



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 08123477756

email : kppt@luwutimurkab.go.id website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372 Tahun 2021 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 373 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Peta Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
 2. Proses Bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel 0.

3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.
4. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR,



ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 196412311987031208

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur.
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur.
4. Kepala BKPSDMA Kab. Luwu Timur.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab Luwu Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

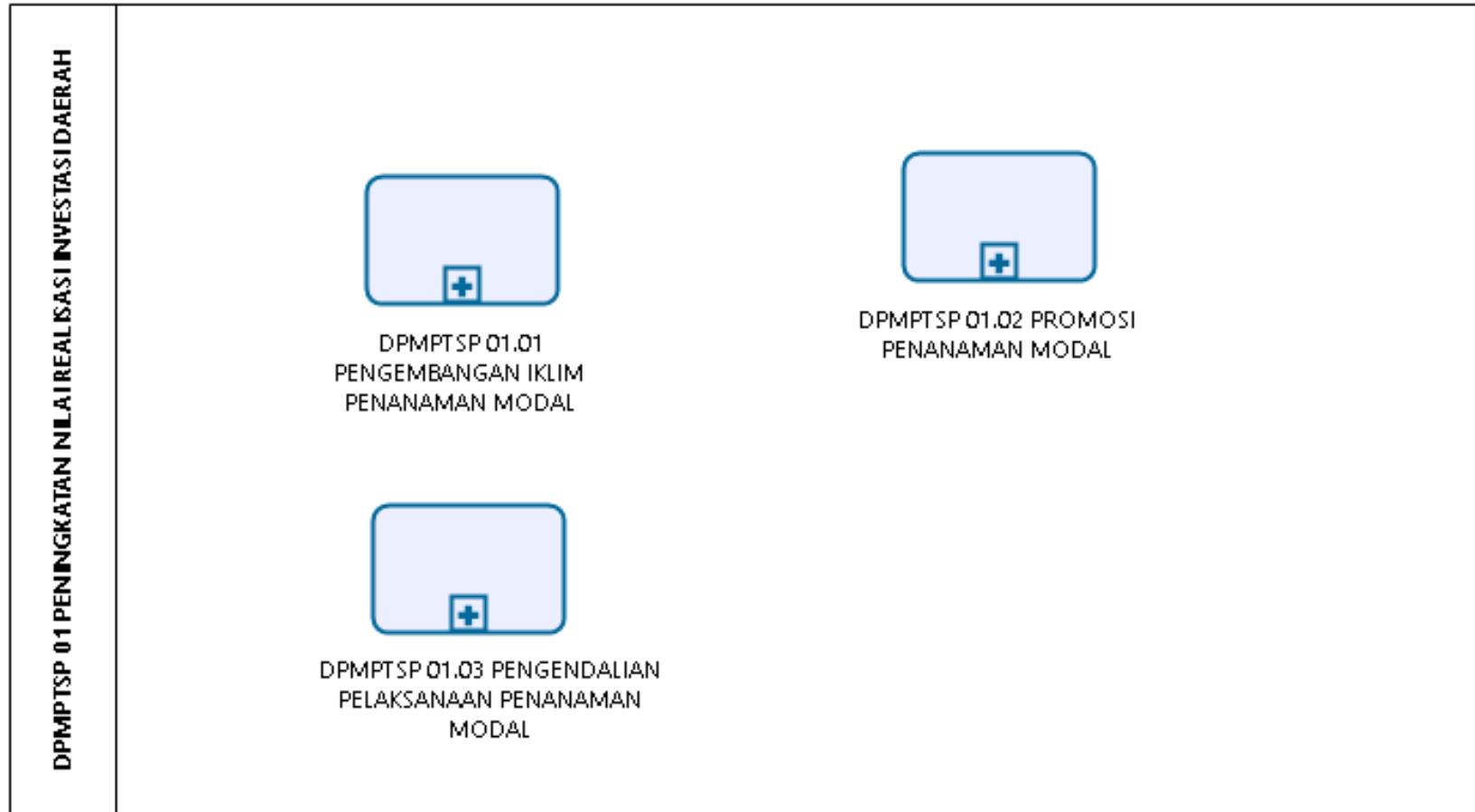
PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

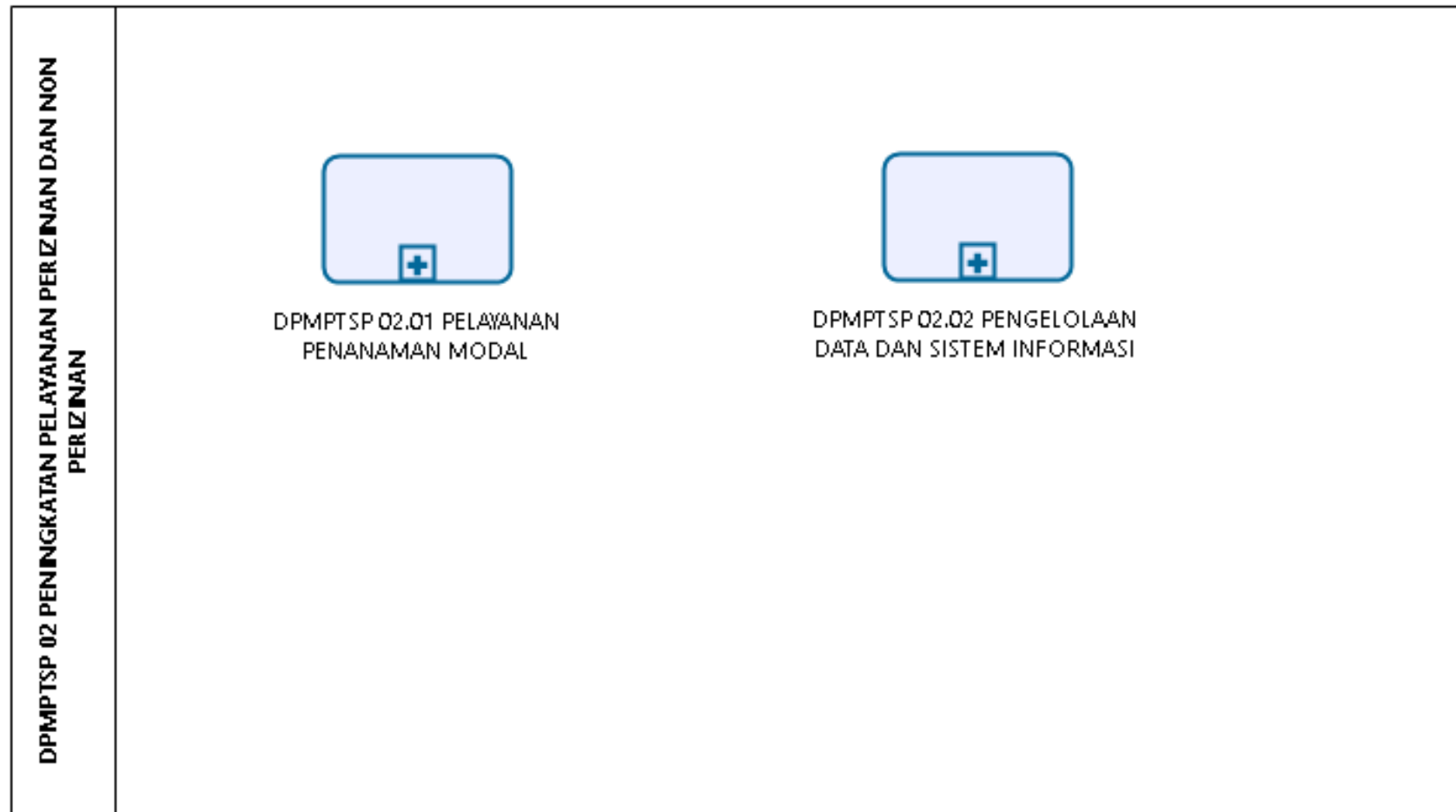
Bagan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

LEVEL 0 : SASARAN STRATEGIS

PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	UTAMA	 DPMPTSP 01 PENINGKATAN NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH  DPMPTSP 02 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	PENDUKUNG	 DPMPTSP 03 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

LEVEL 1 : PROGRAM





DPMPTSP 03 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCAPAIAN
KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH



DPMPTSP 03.01 PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA

LEVEL 2 : KEGIATAN

DPMPTSP 01.01 PENGEMBANGAN KLM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP01.01.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DPMPTSP01.01.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota
---	---

DPMPTSP 01.02 PROMOSI PENANAMAN MODAL	 DPMPTSP 01.02.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
--	--

DPMPTSP 01.03 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	 DPMPTSP01.03.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
---	---

DPMPTSP 02.01 PELAYANAN PENANAMAN MODAL	 DPMPTSP02.01.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
--	---

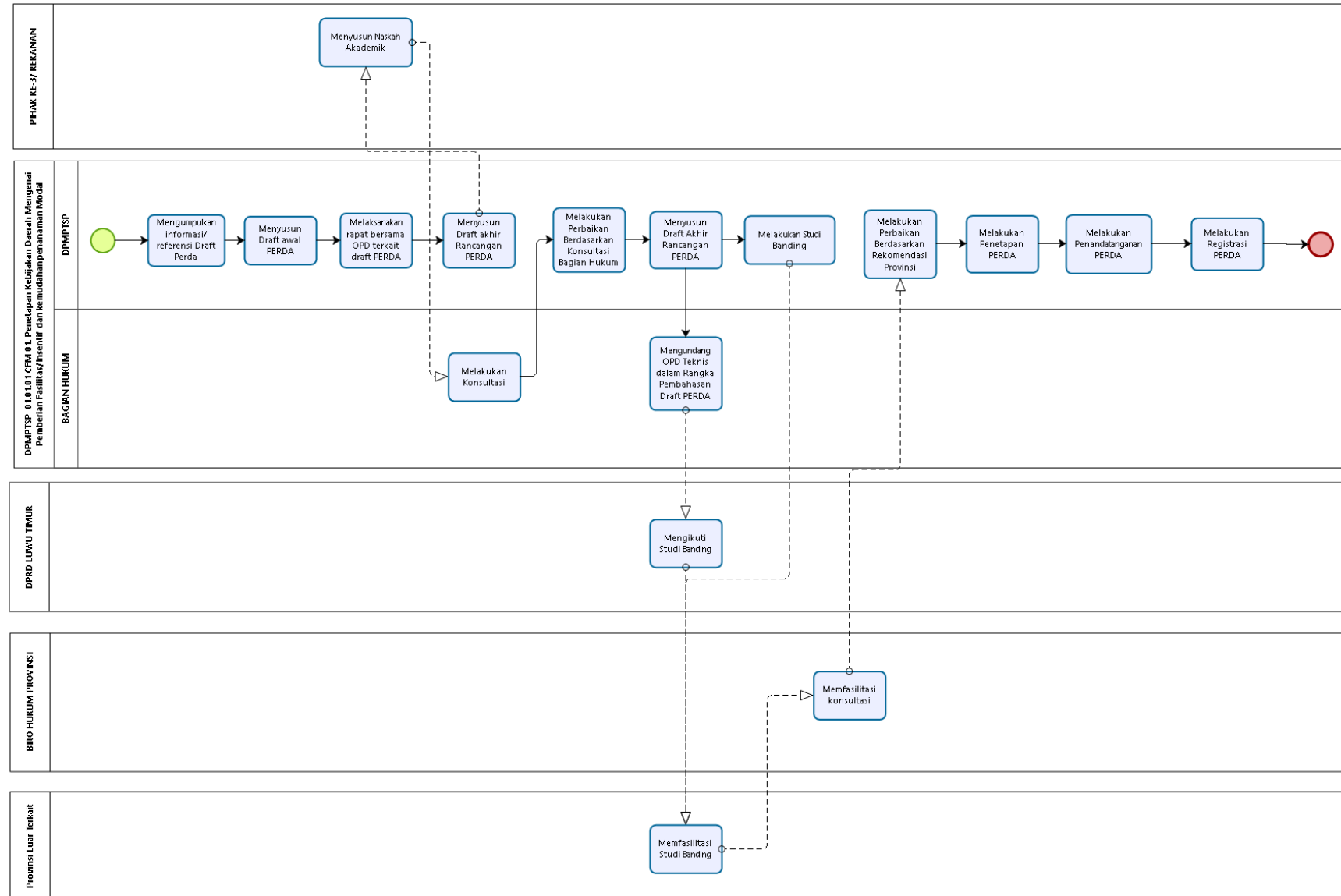
DPMPTSP 02.02 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

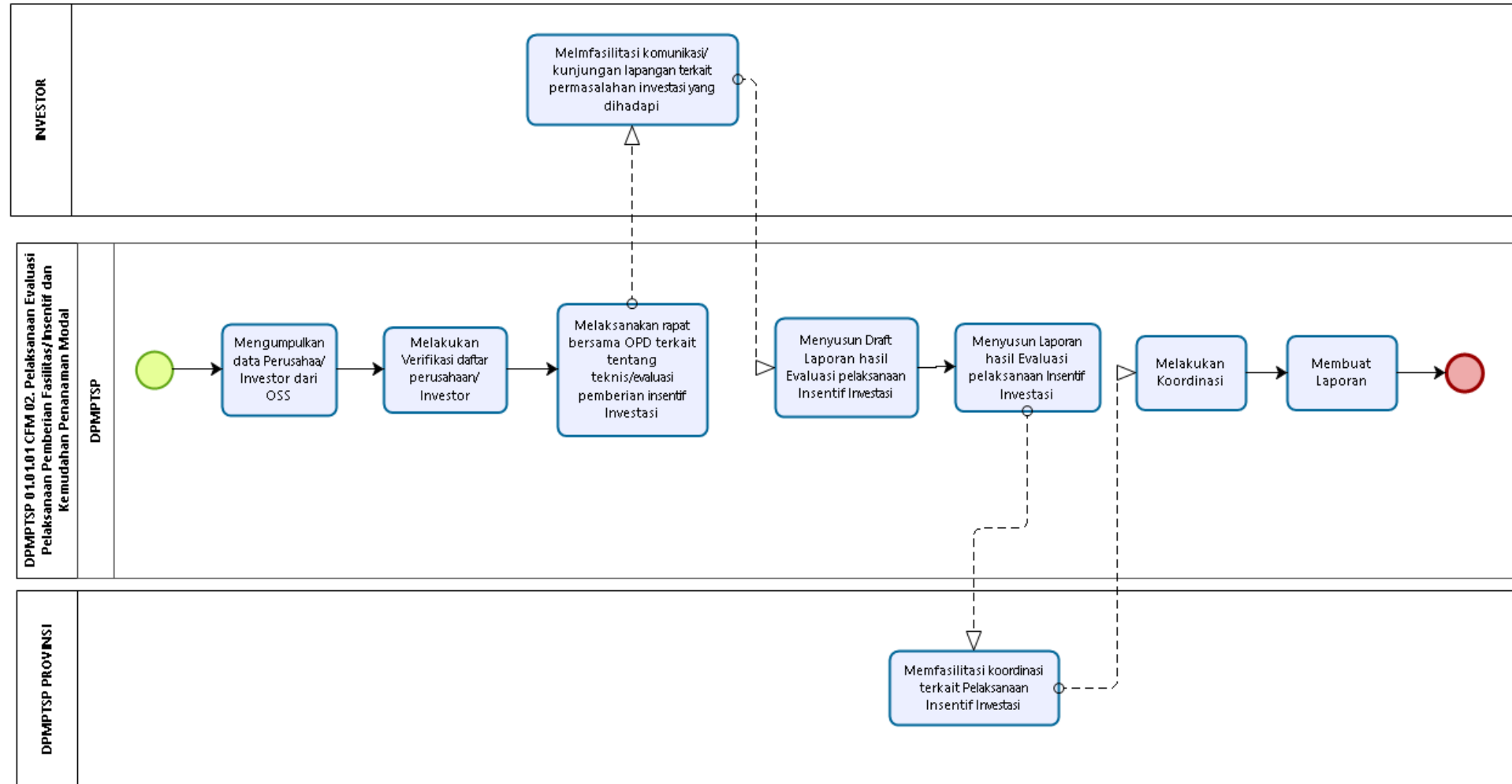


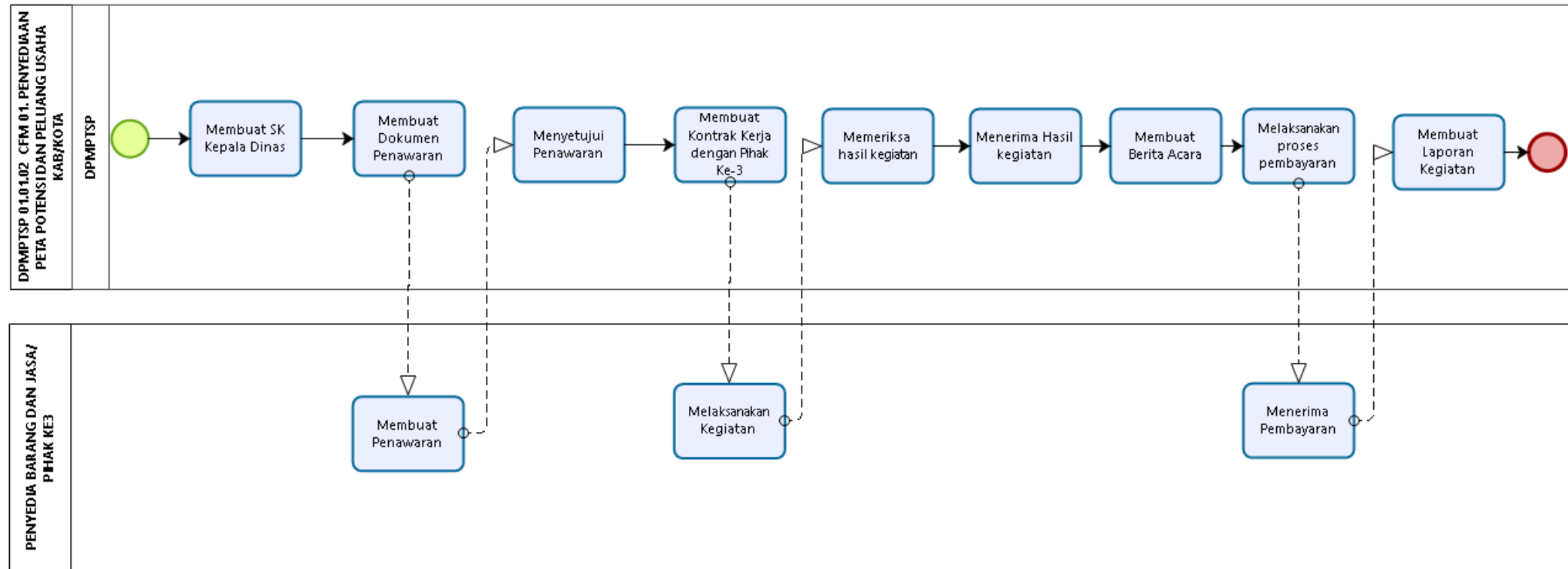
DPMPTSP02.02.01 Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

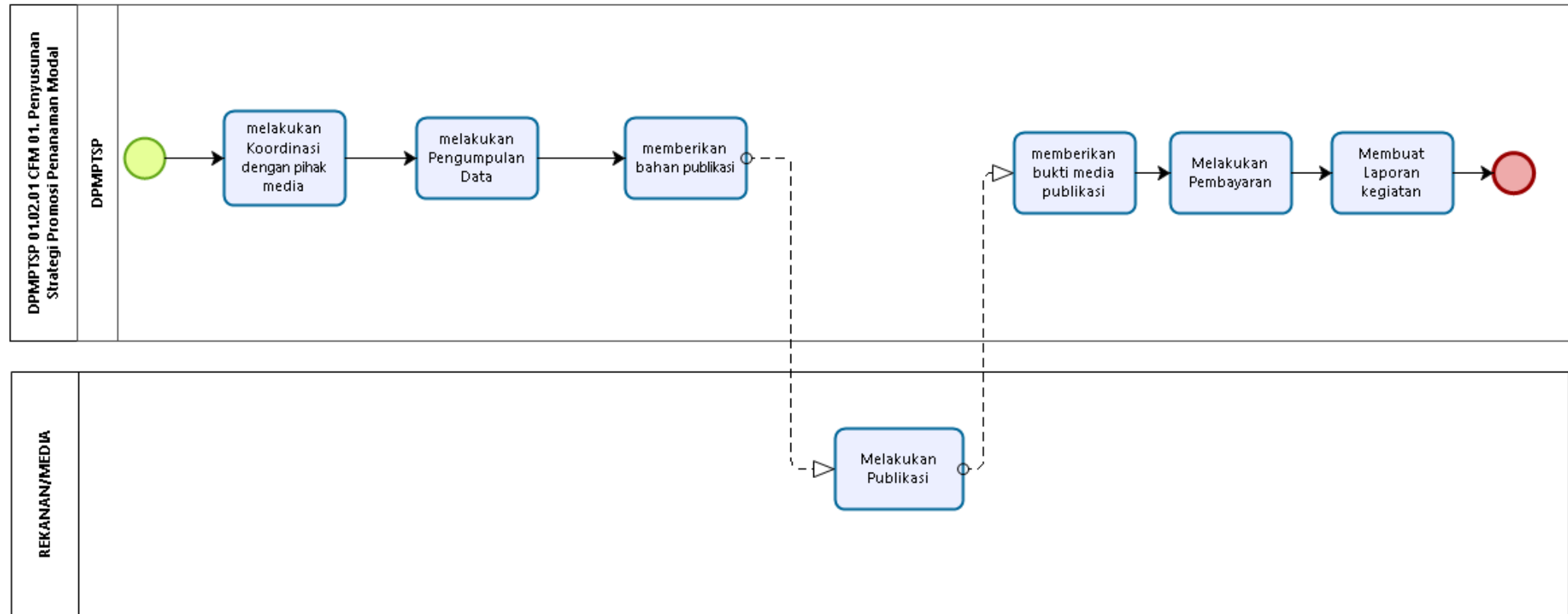
DPMPTSP 03.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA					
	DPMPTSP03.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP03.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP03.01.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP03.01.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					
	DPMPTSP03.01.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP03.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP03.01.07 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP03.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP03.01.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

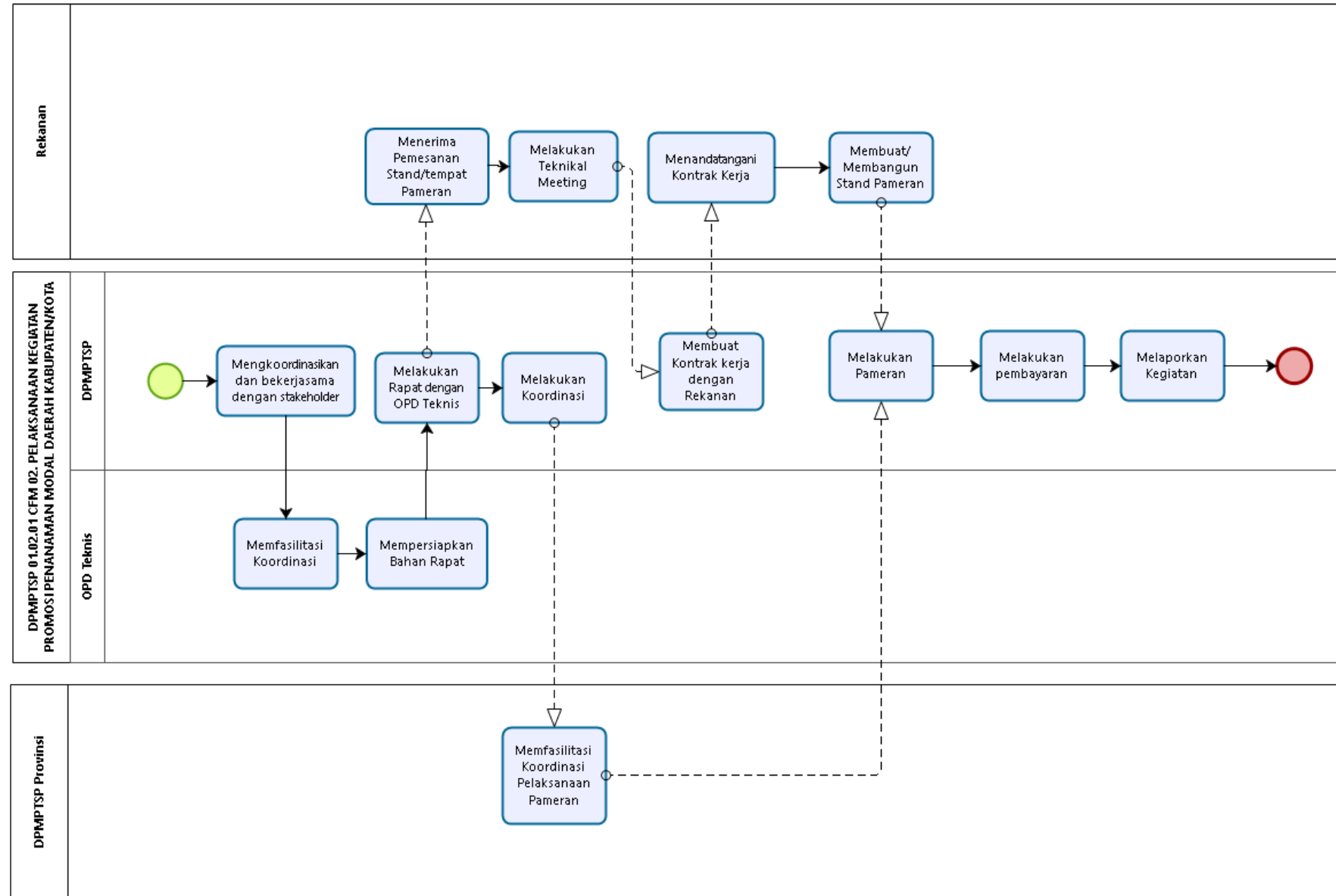
LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (Cross Functional Map)
BIDANG PENANAMAN MODAL



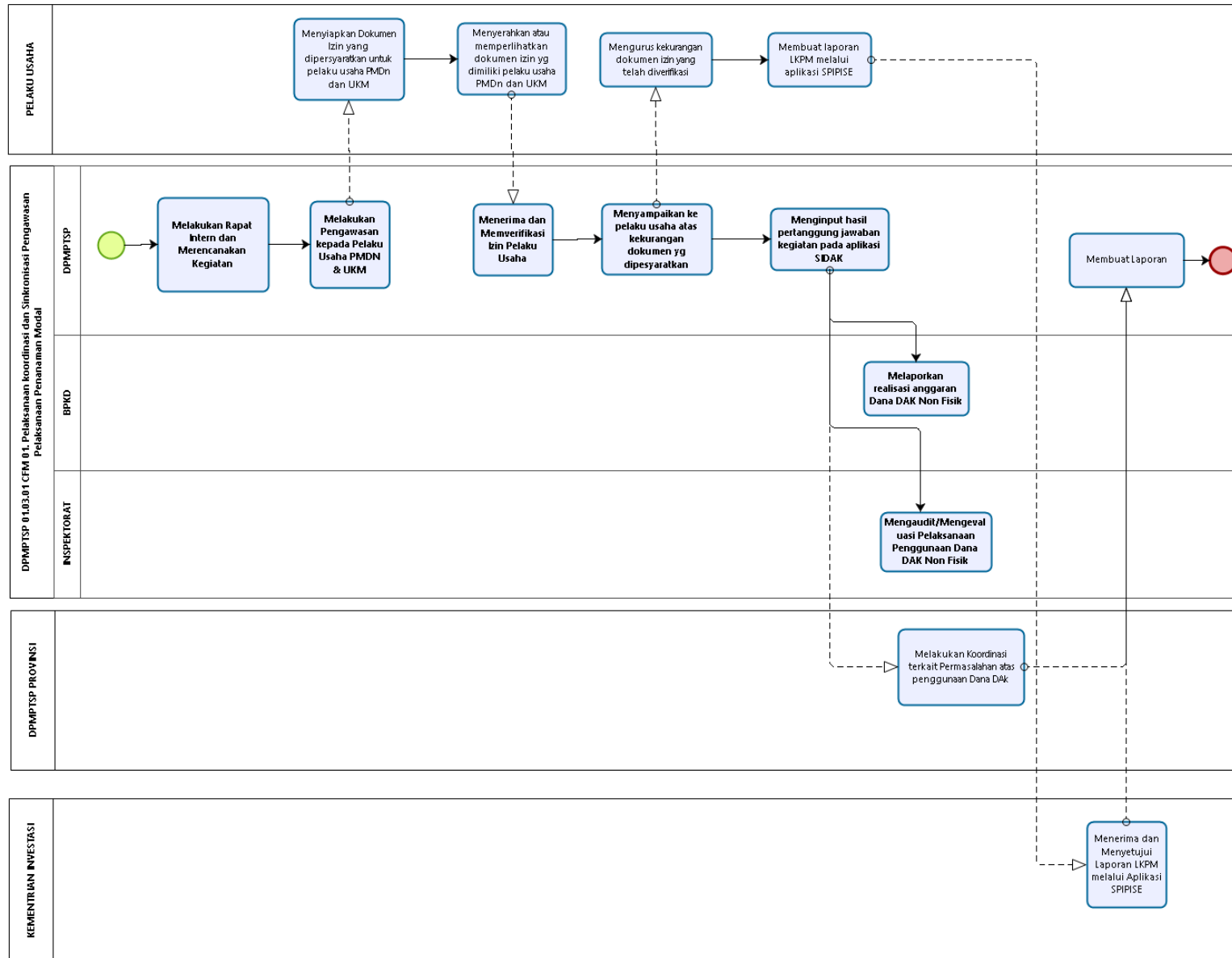


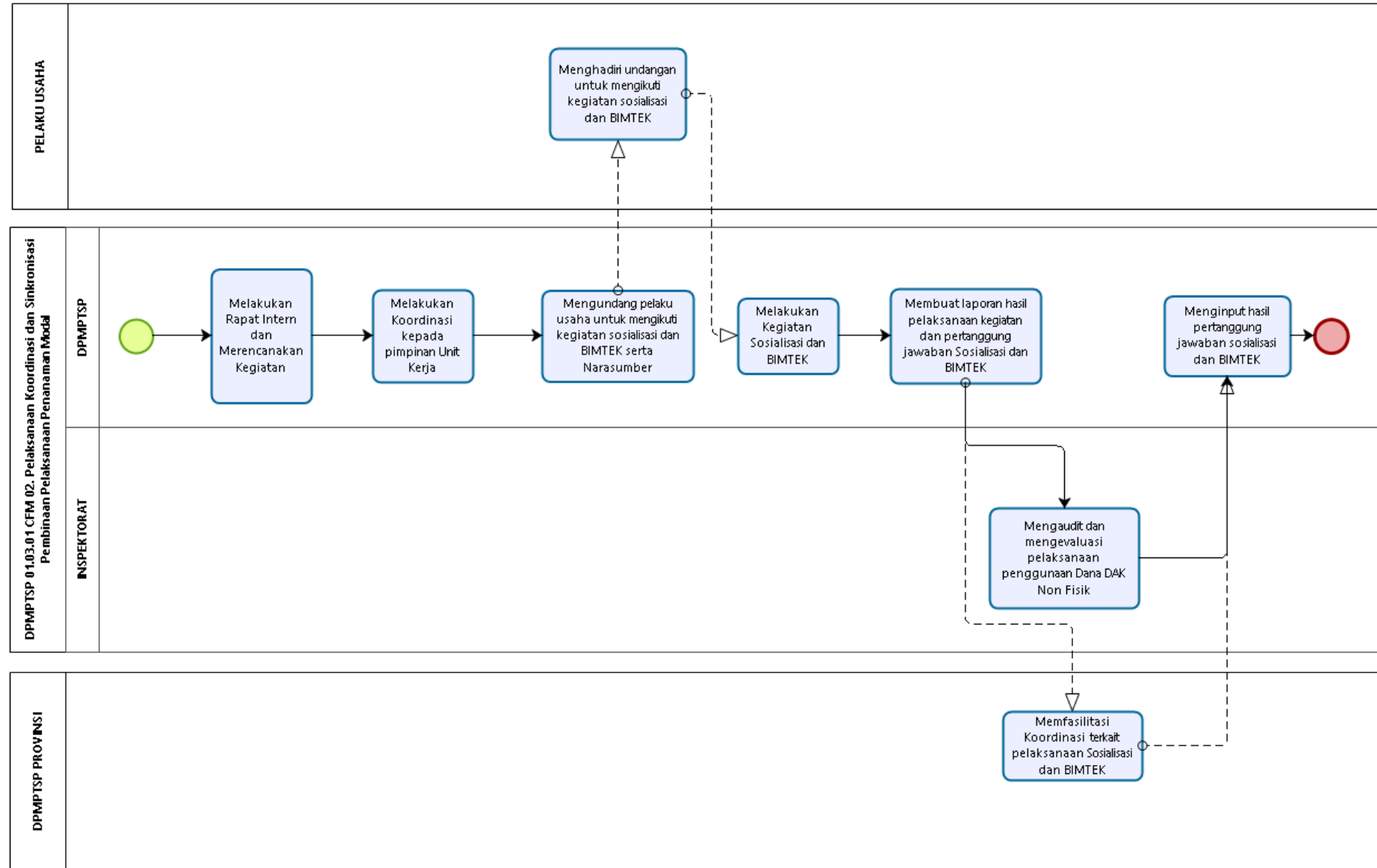


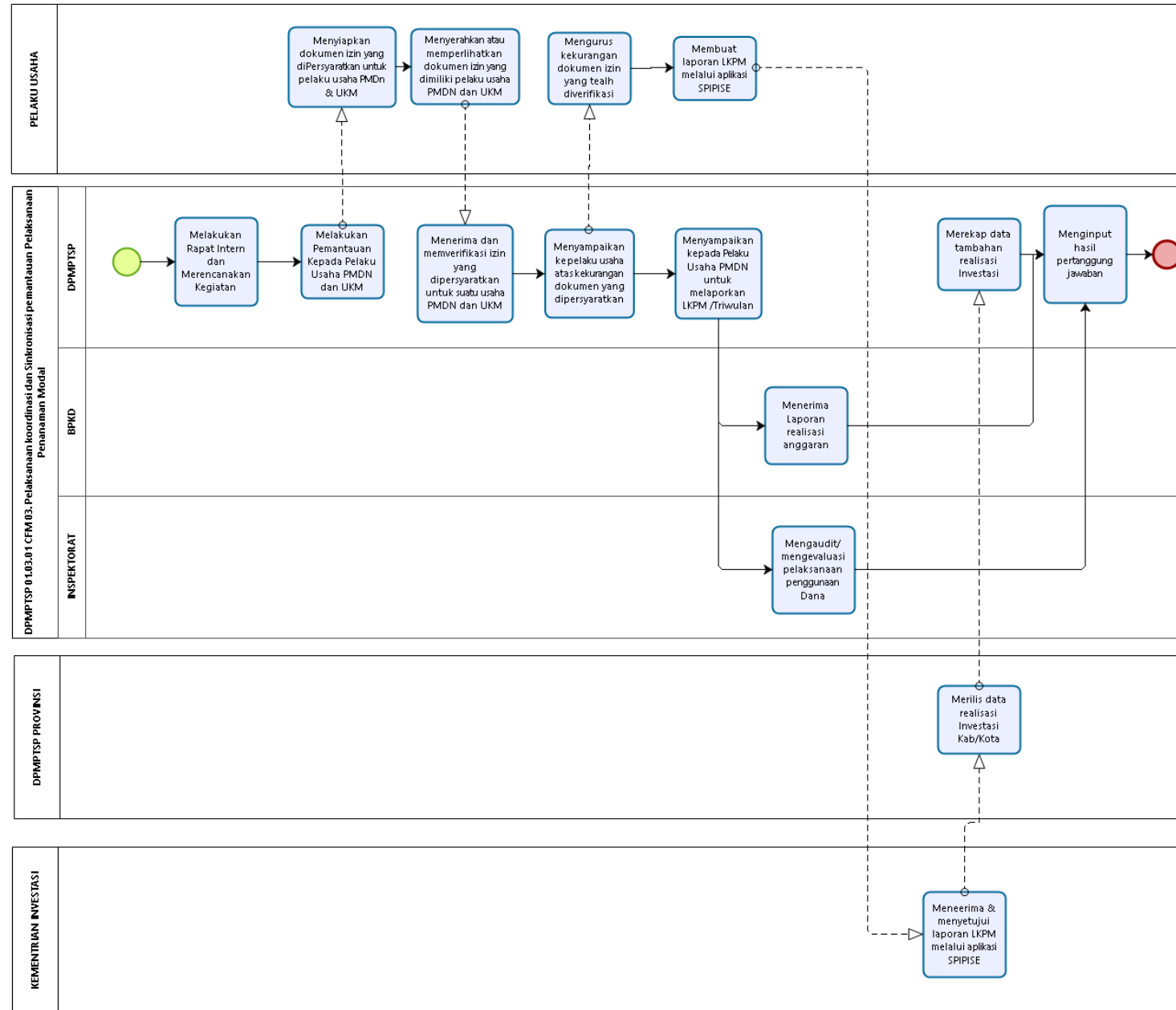




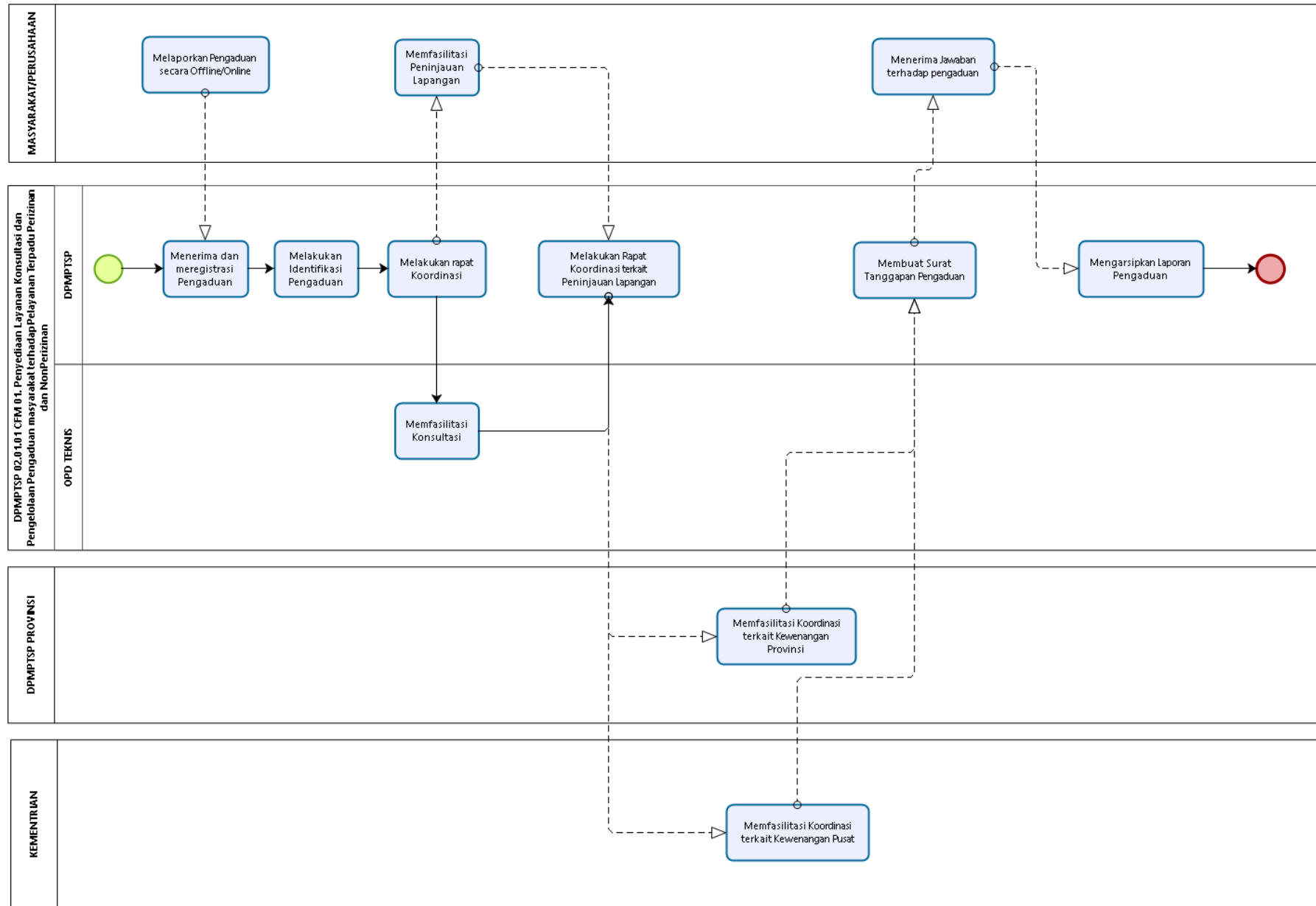
BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

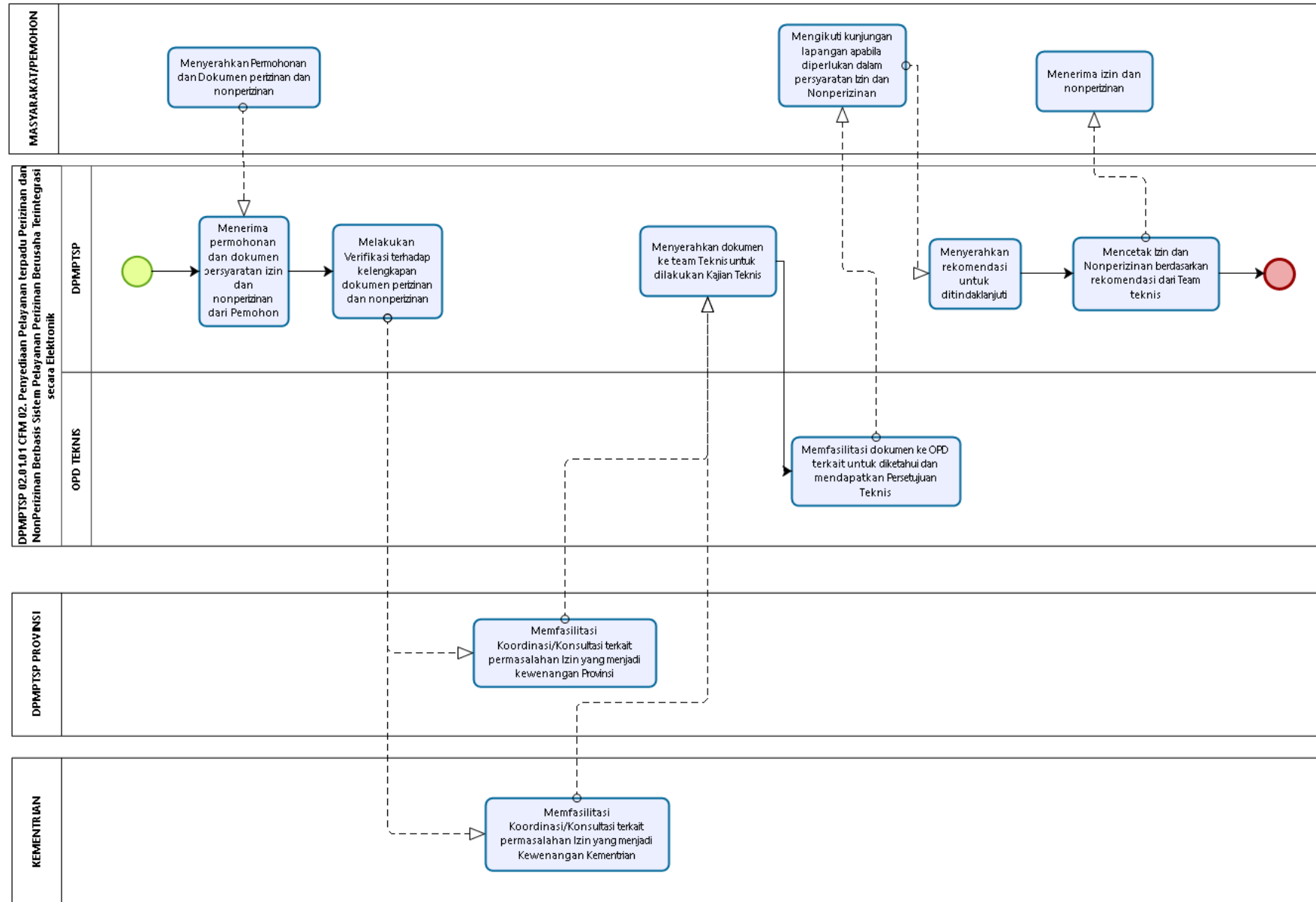


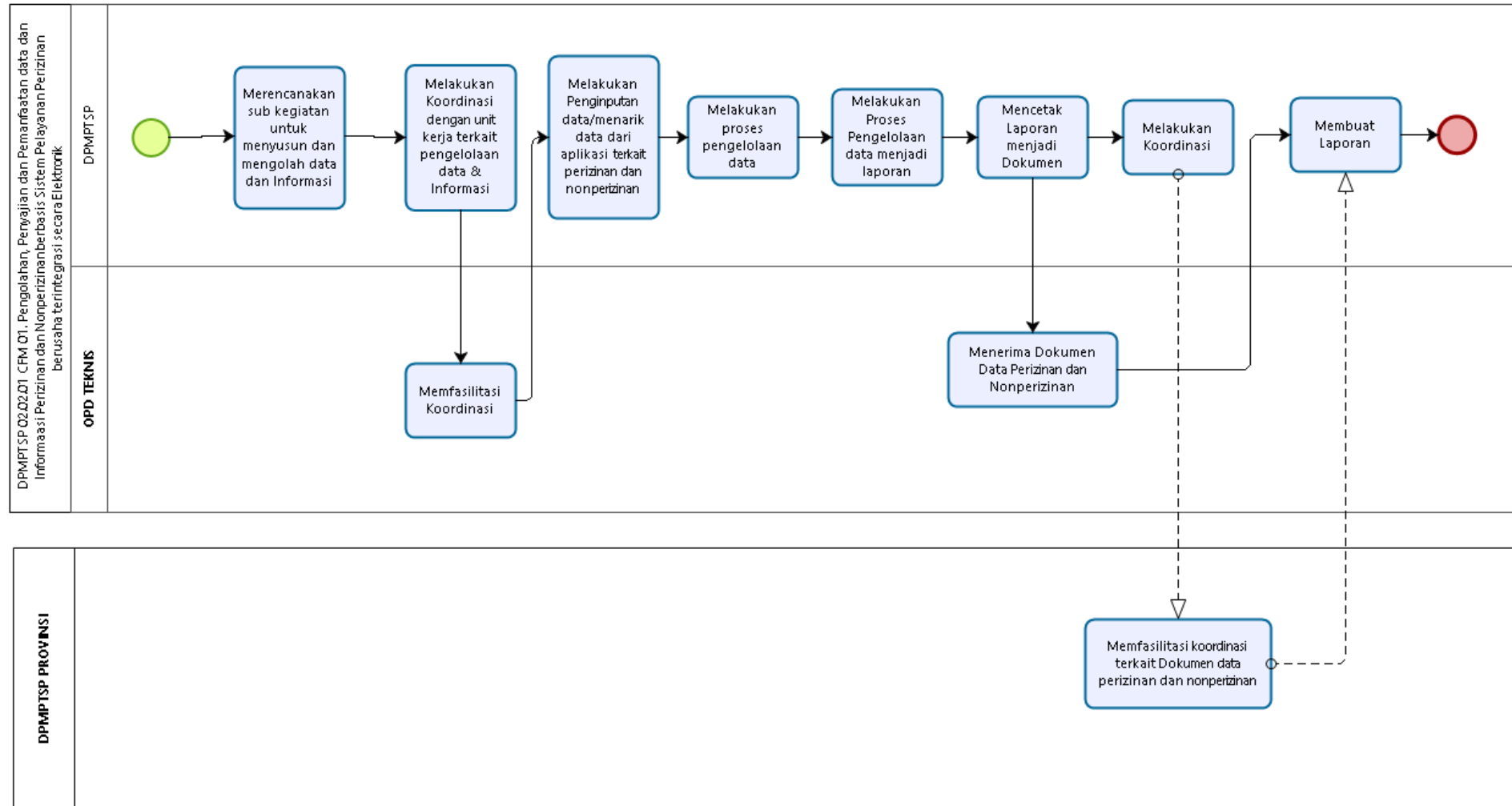




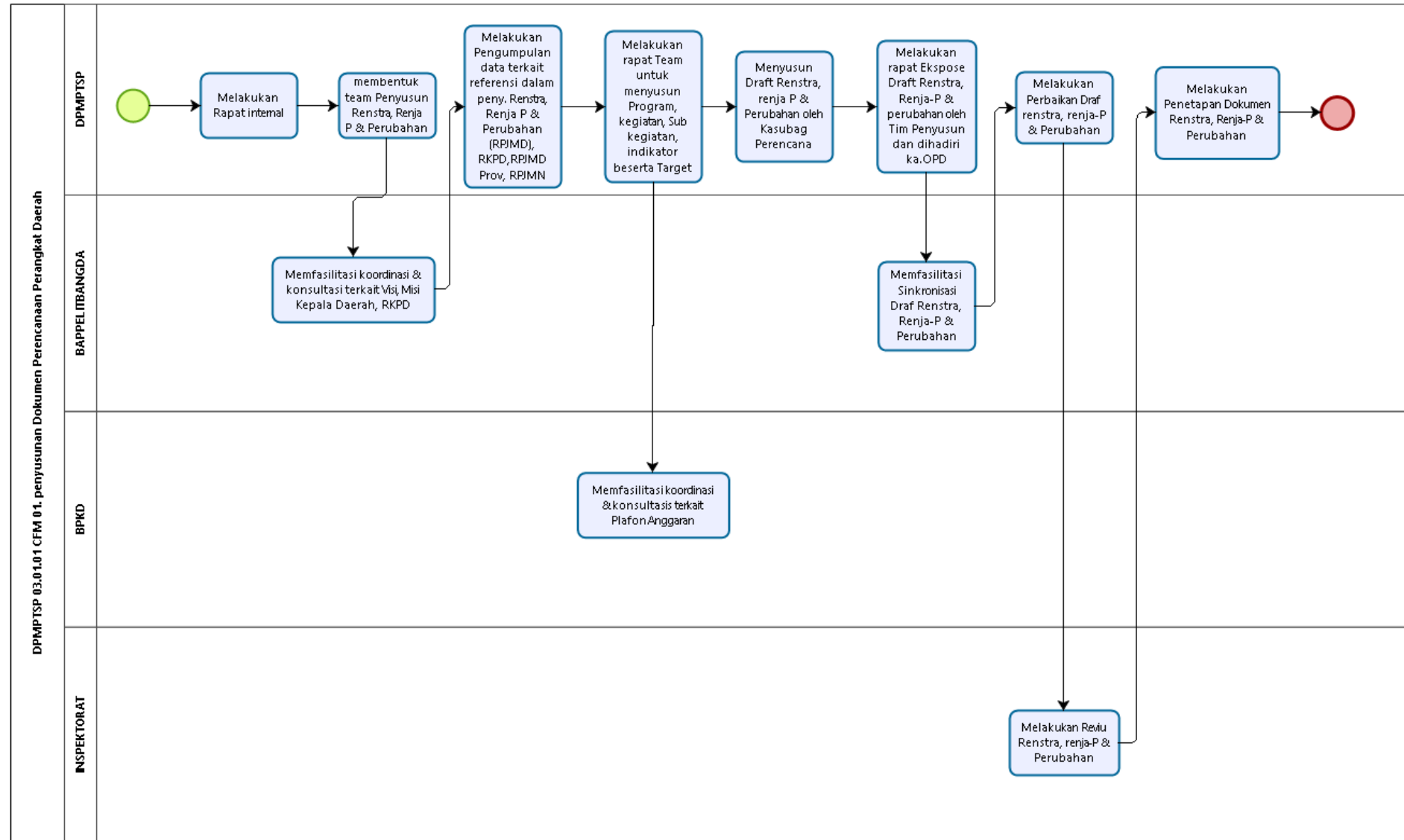
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

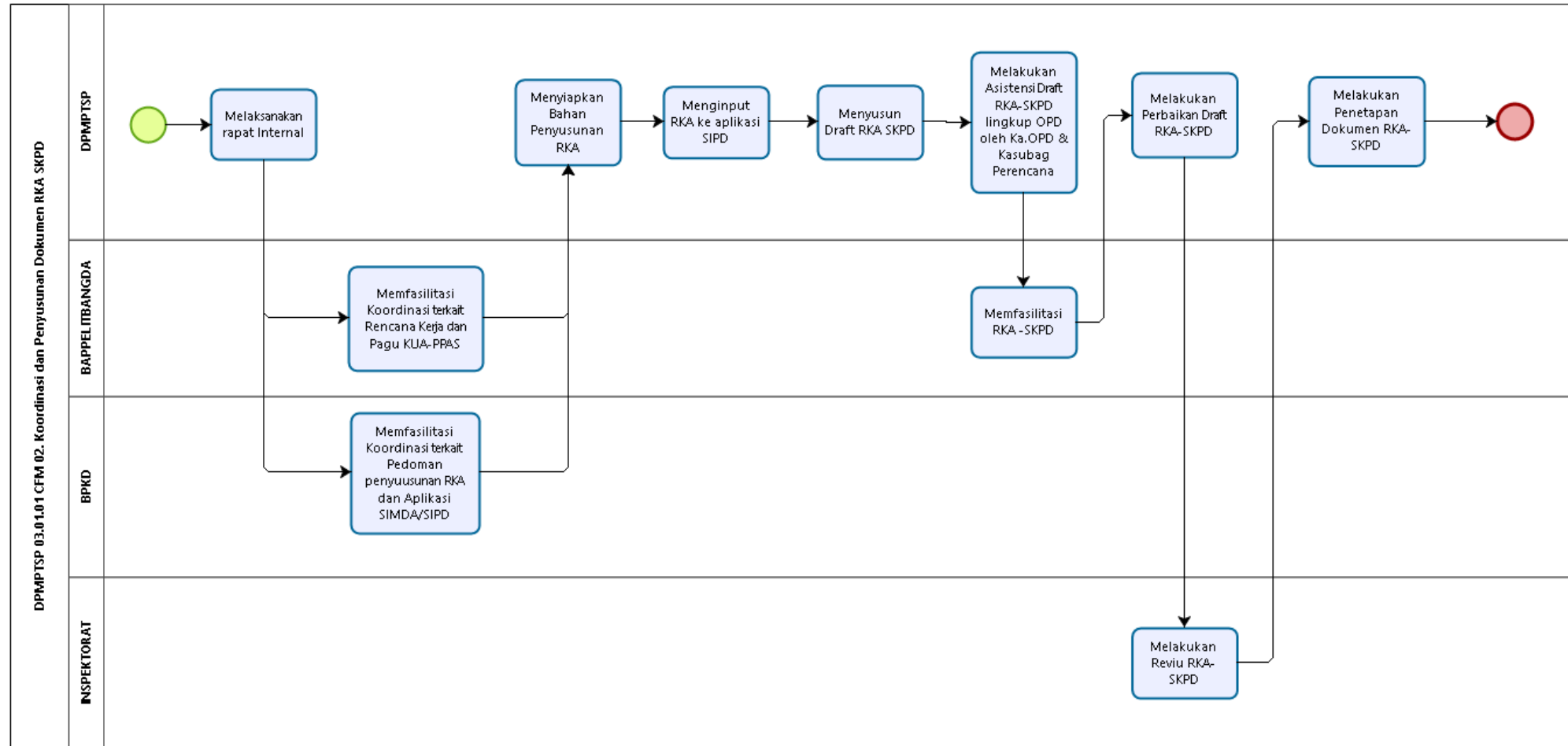


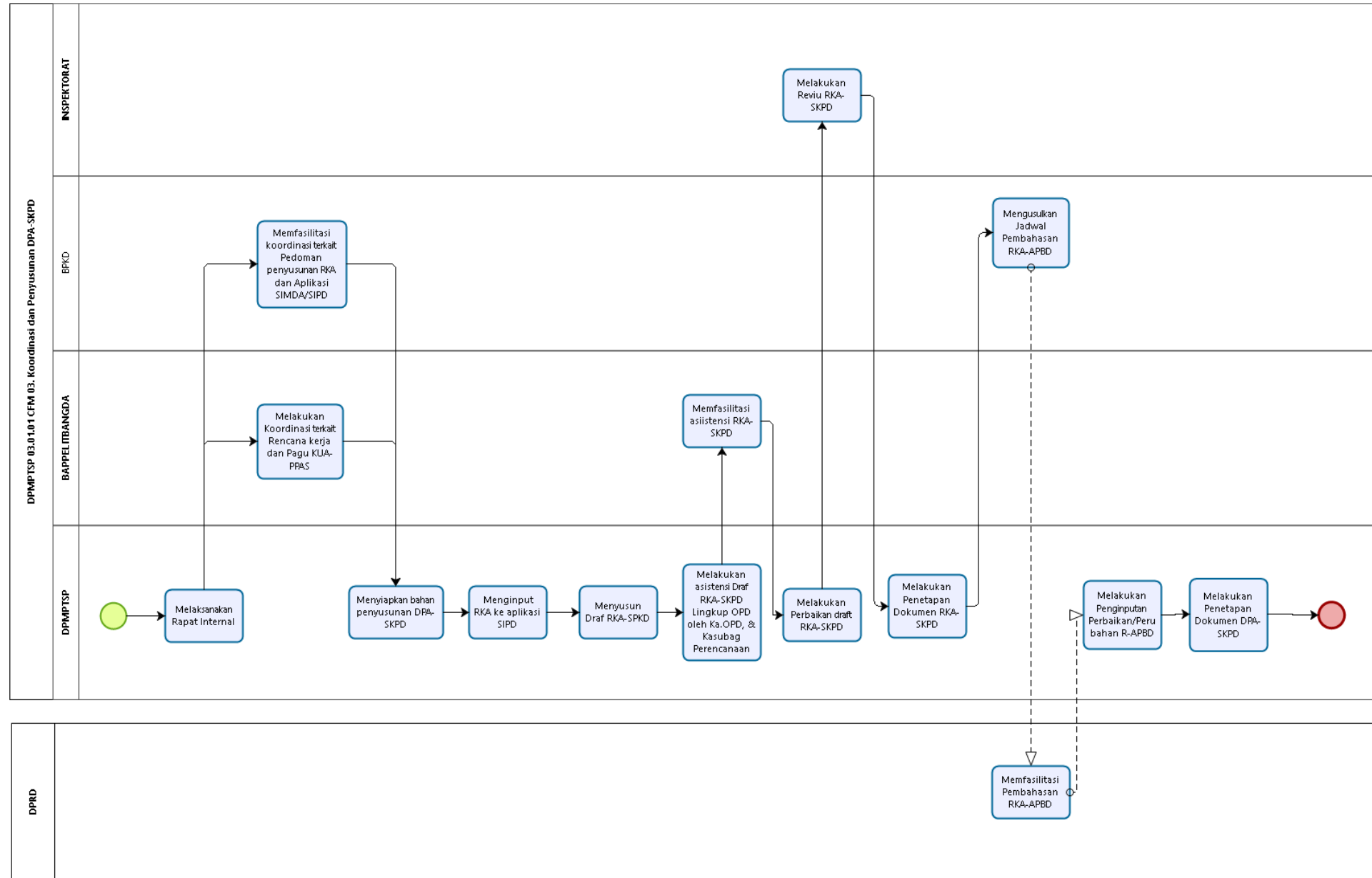


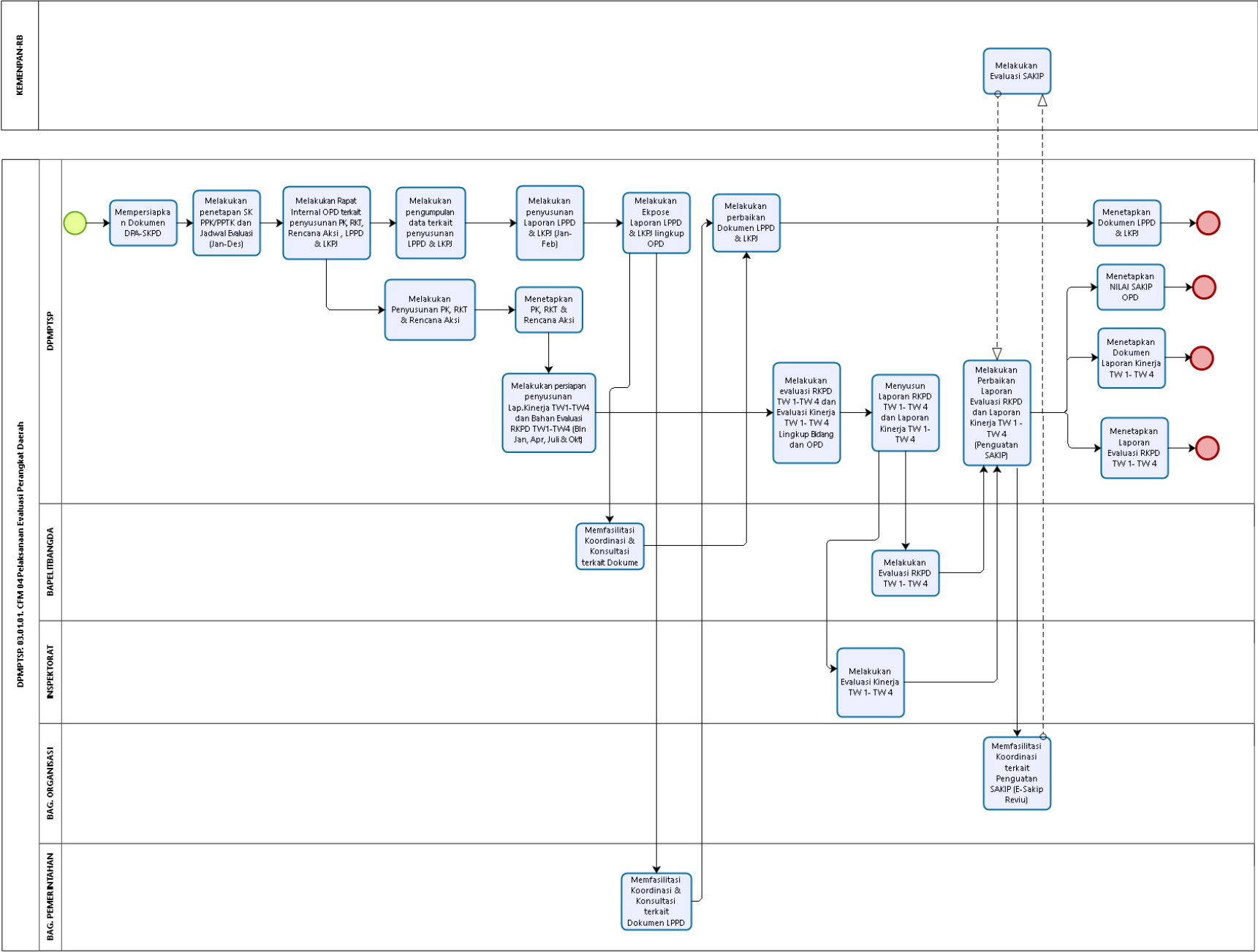


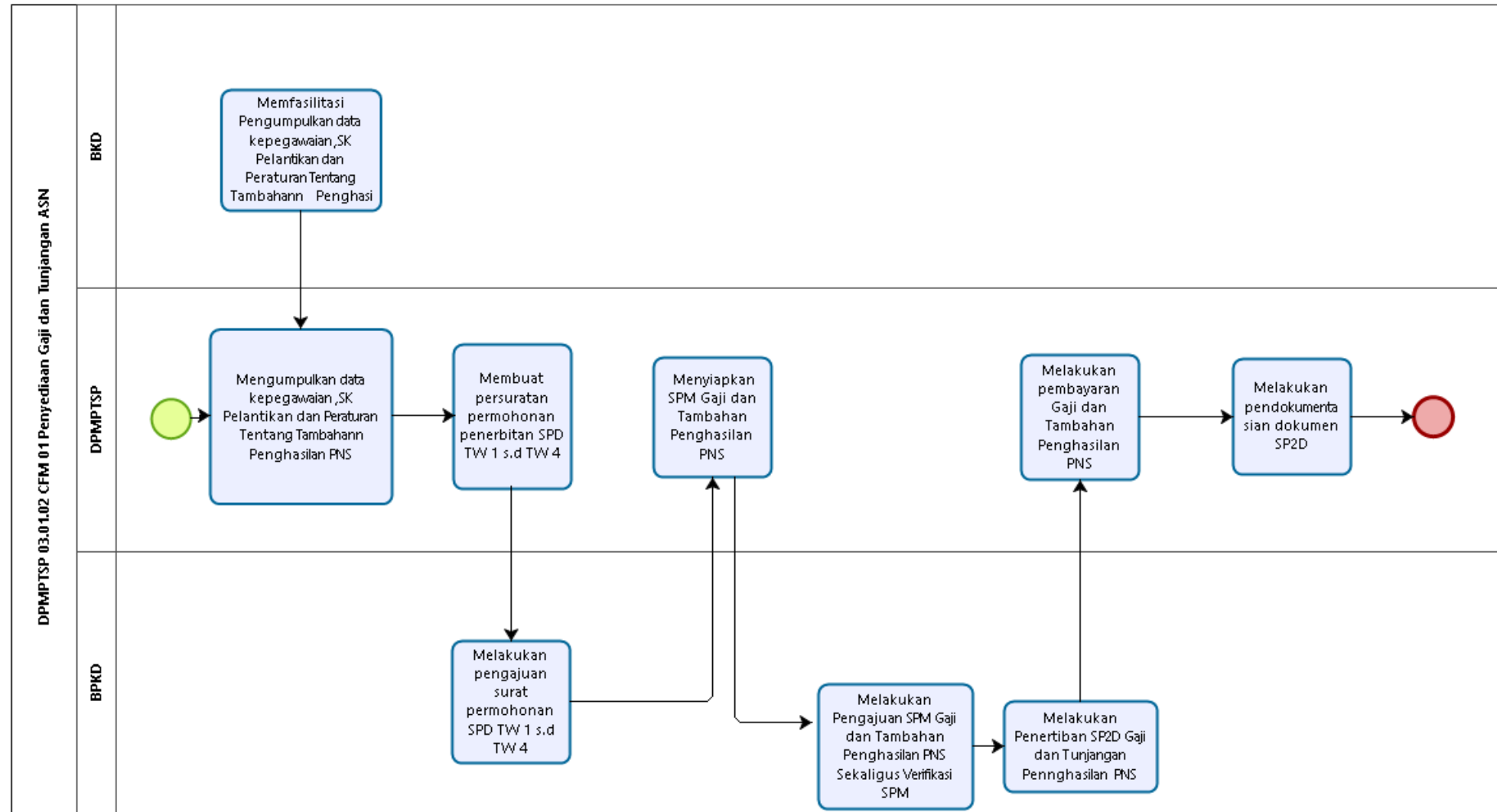
SEKRETARIAT

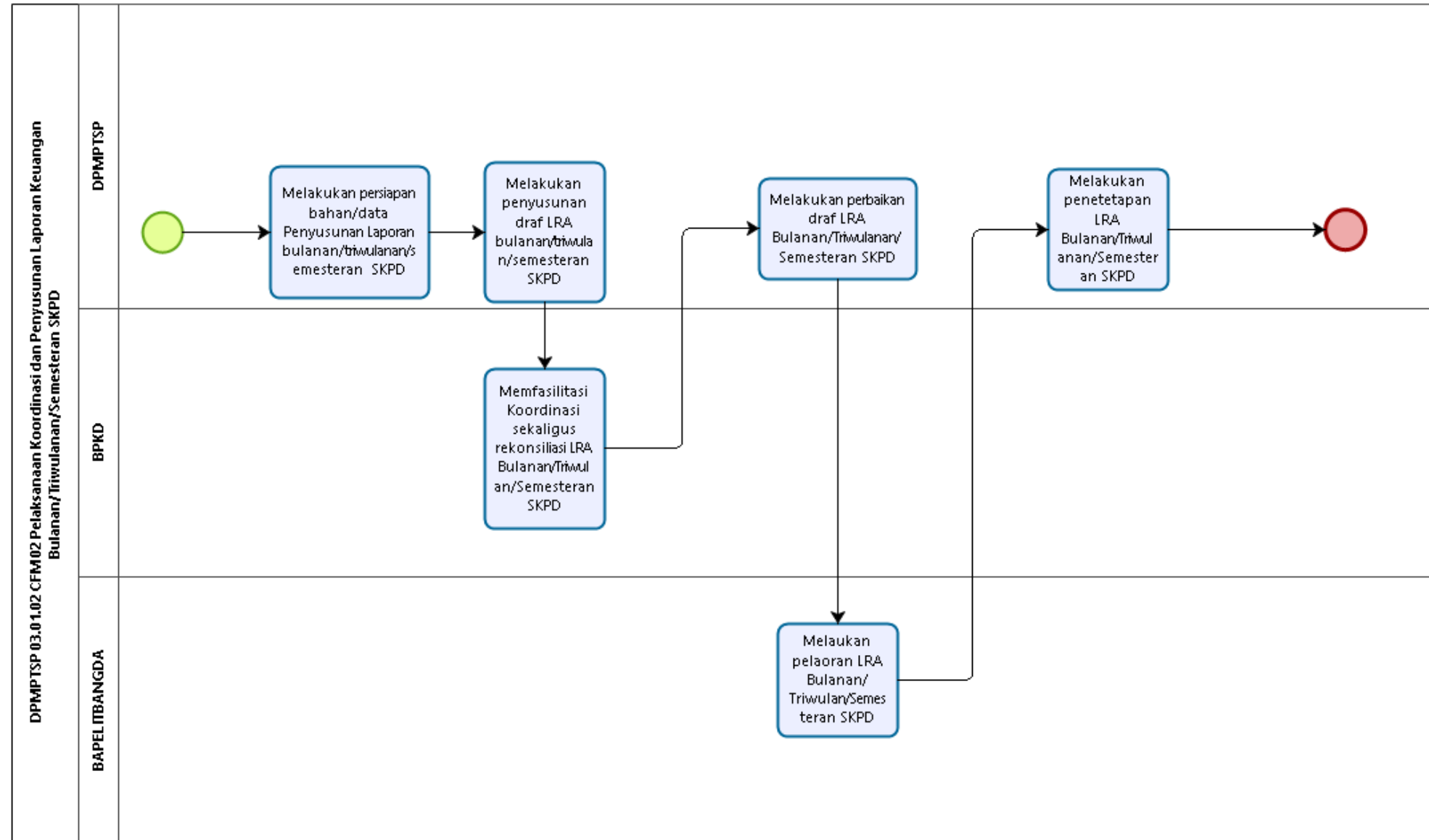


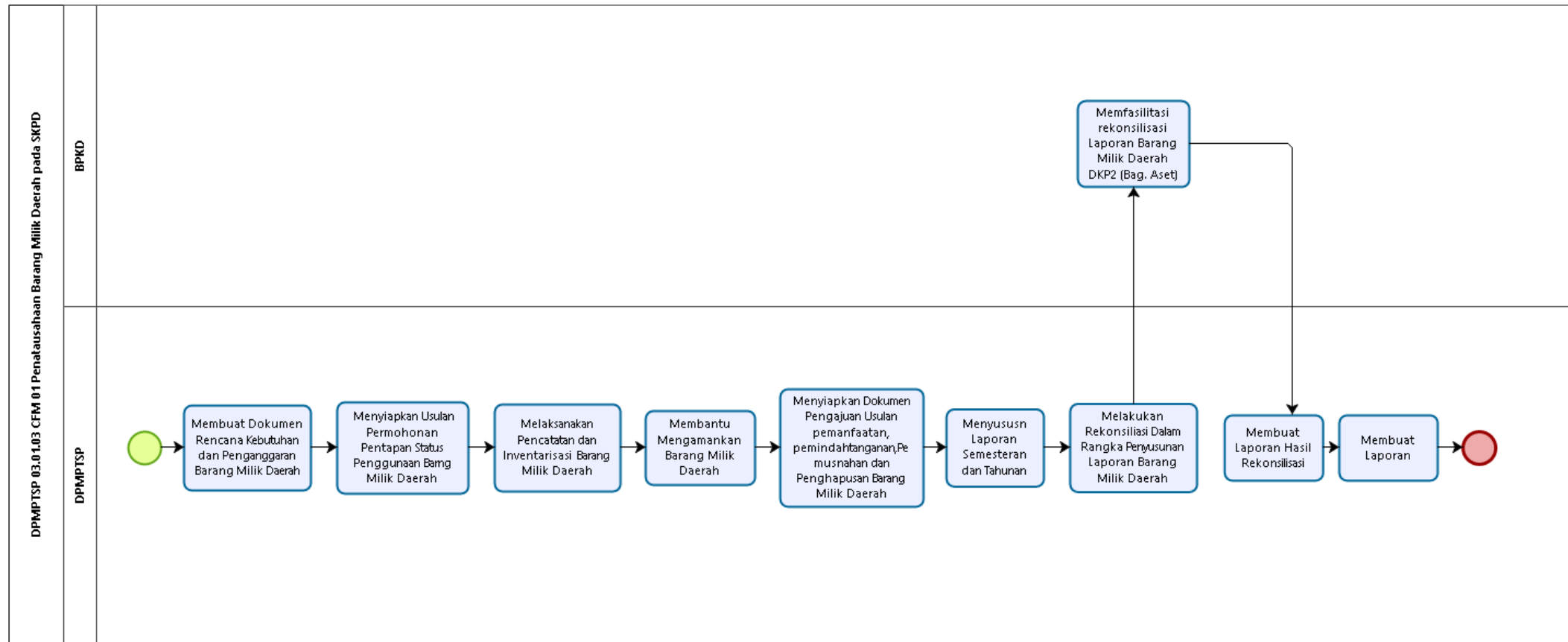


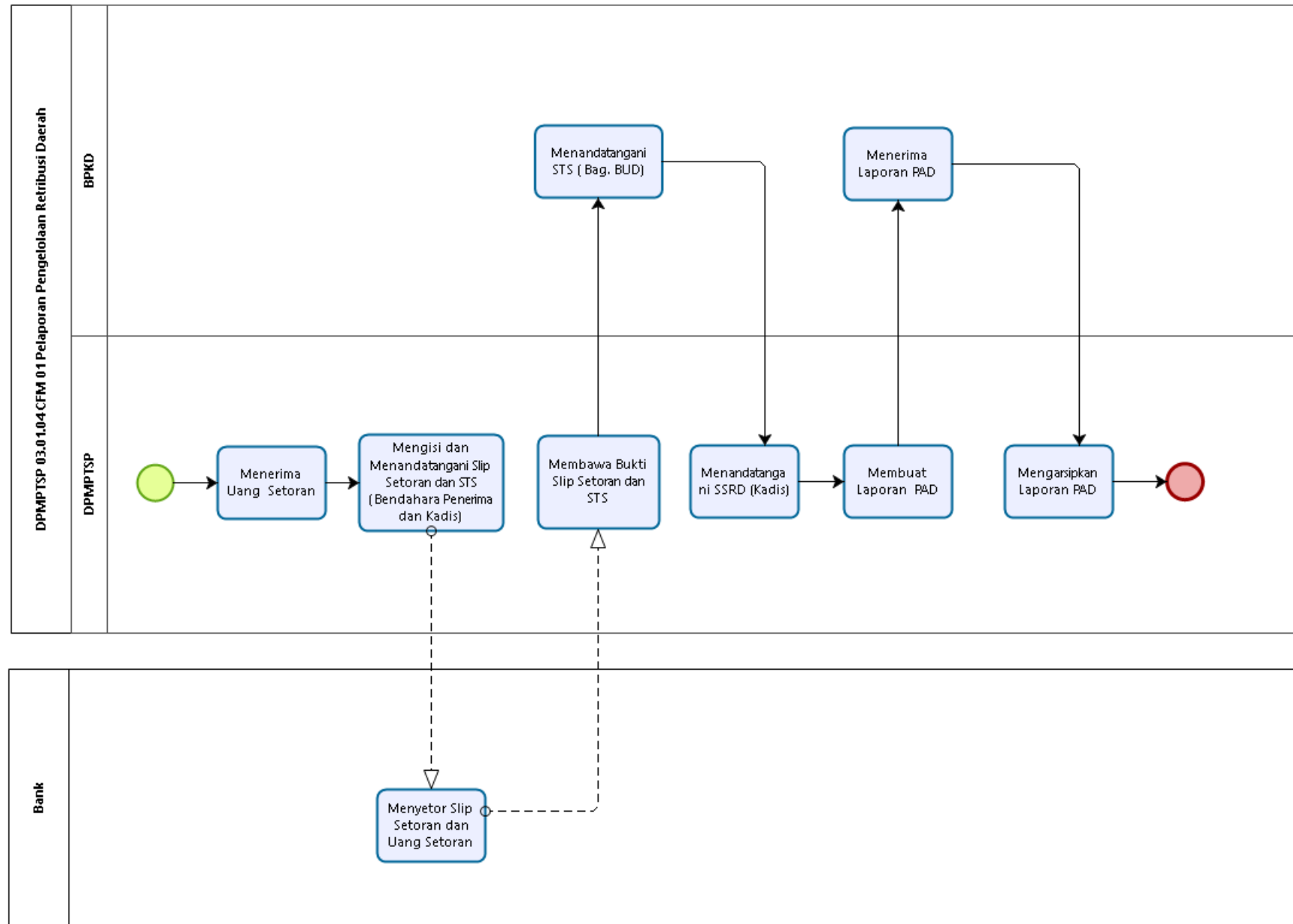


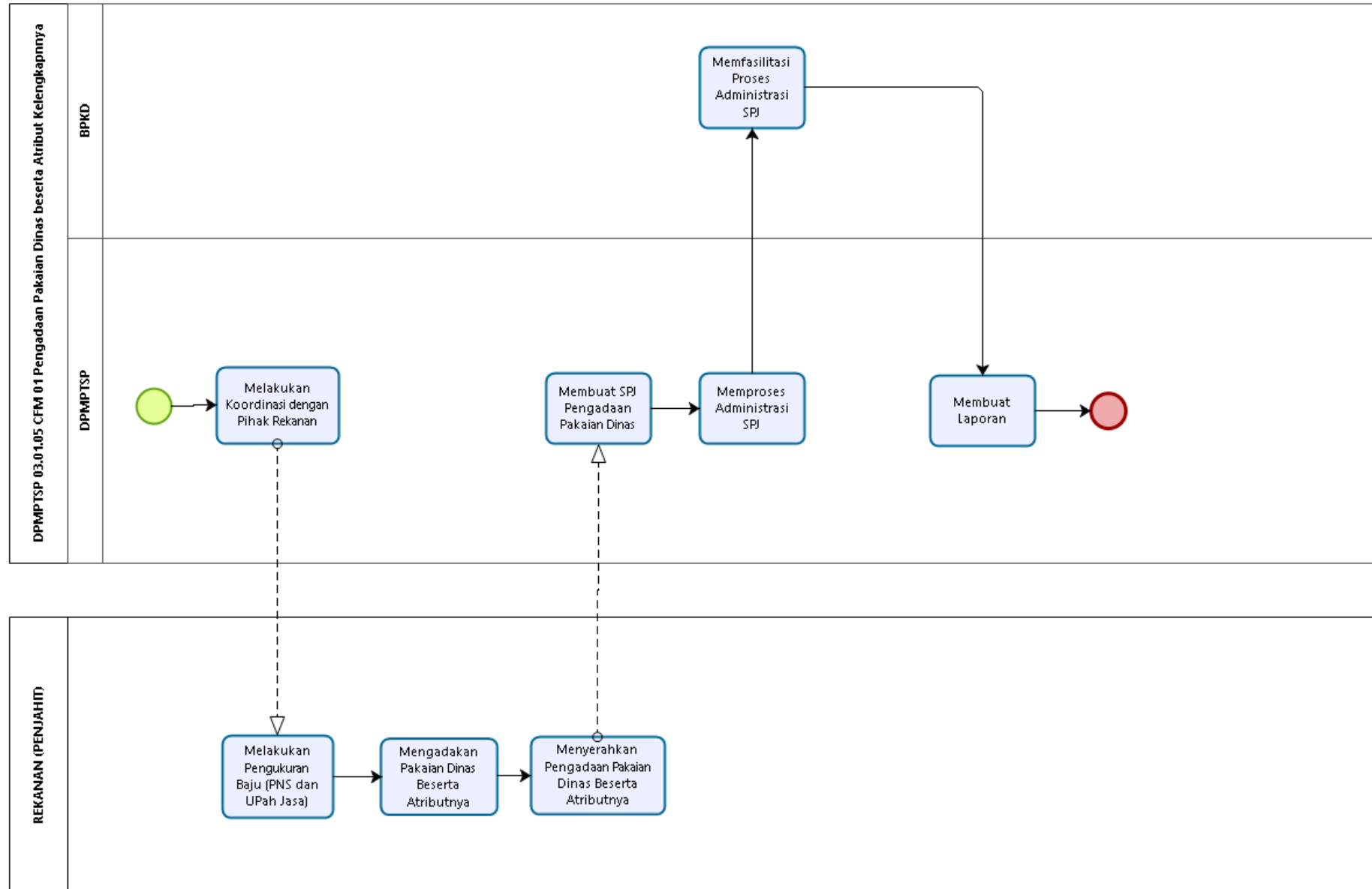


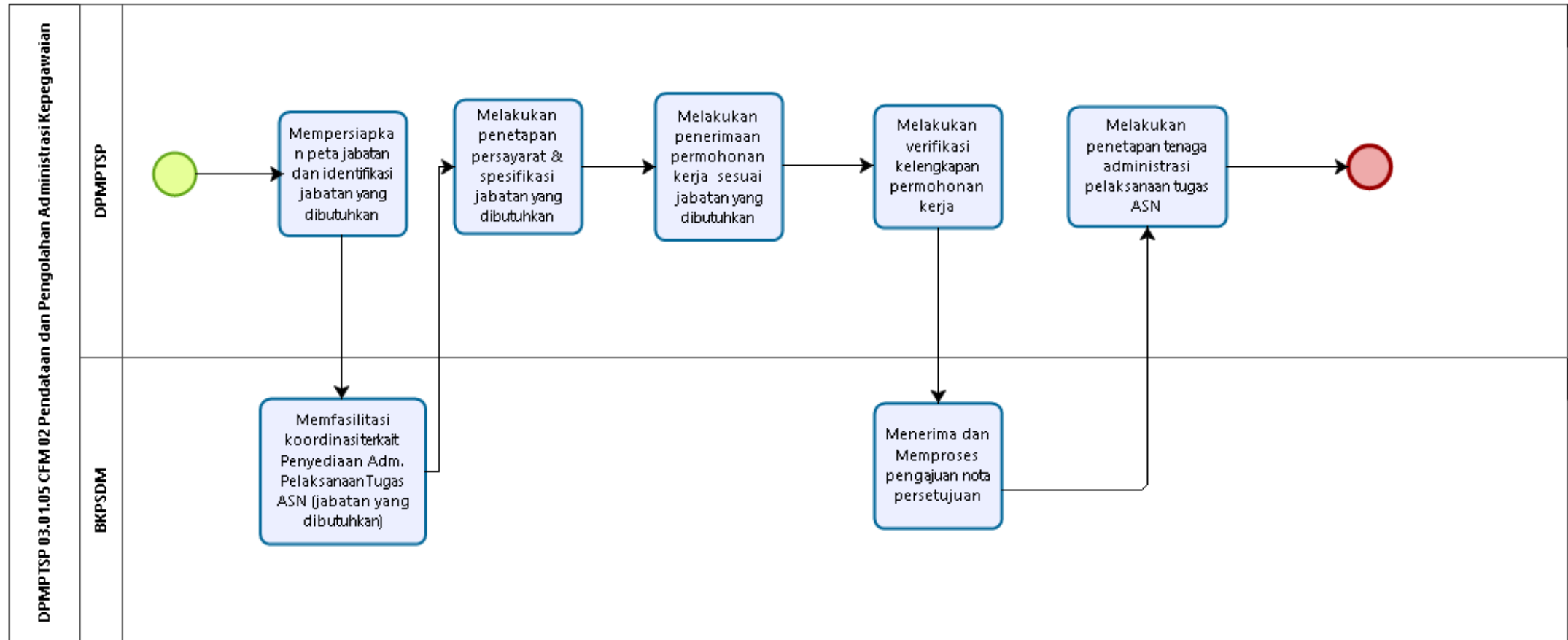


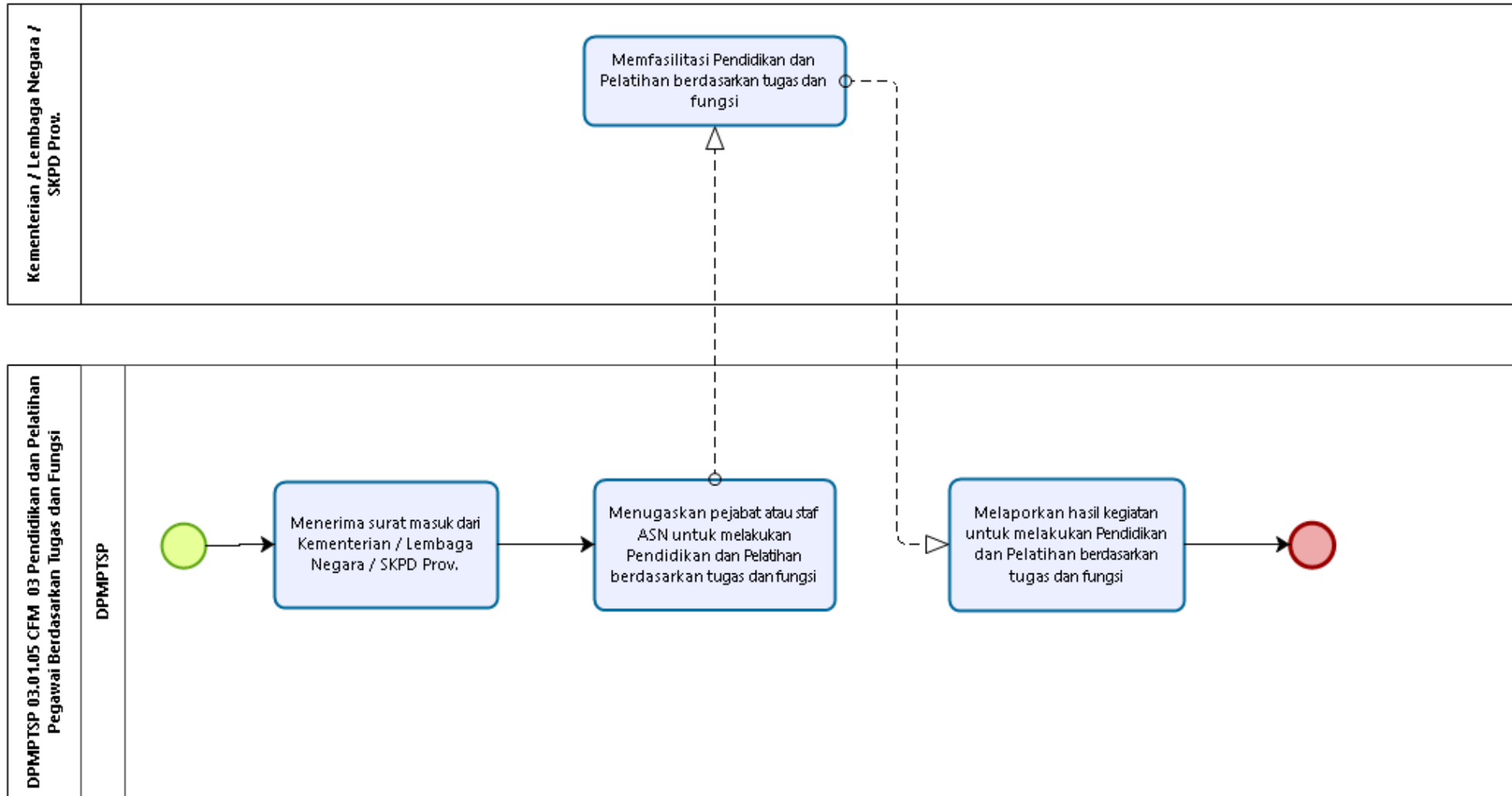


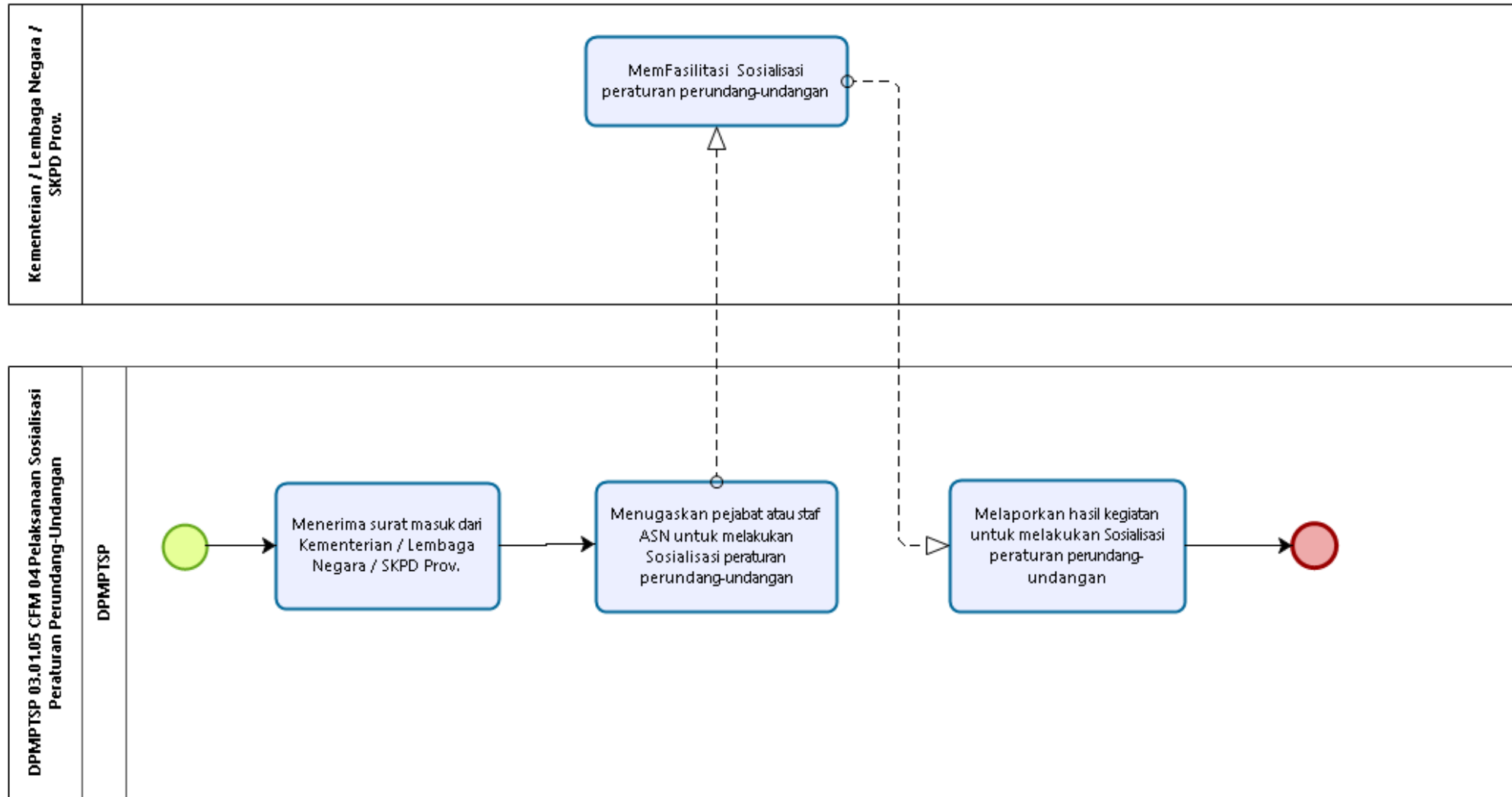


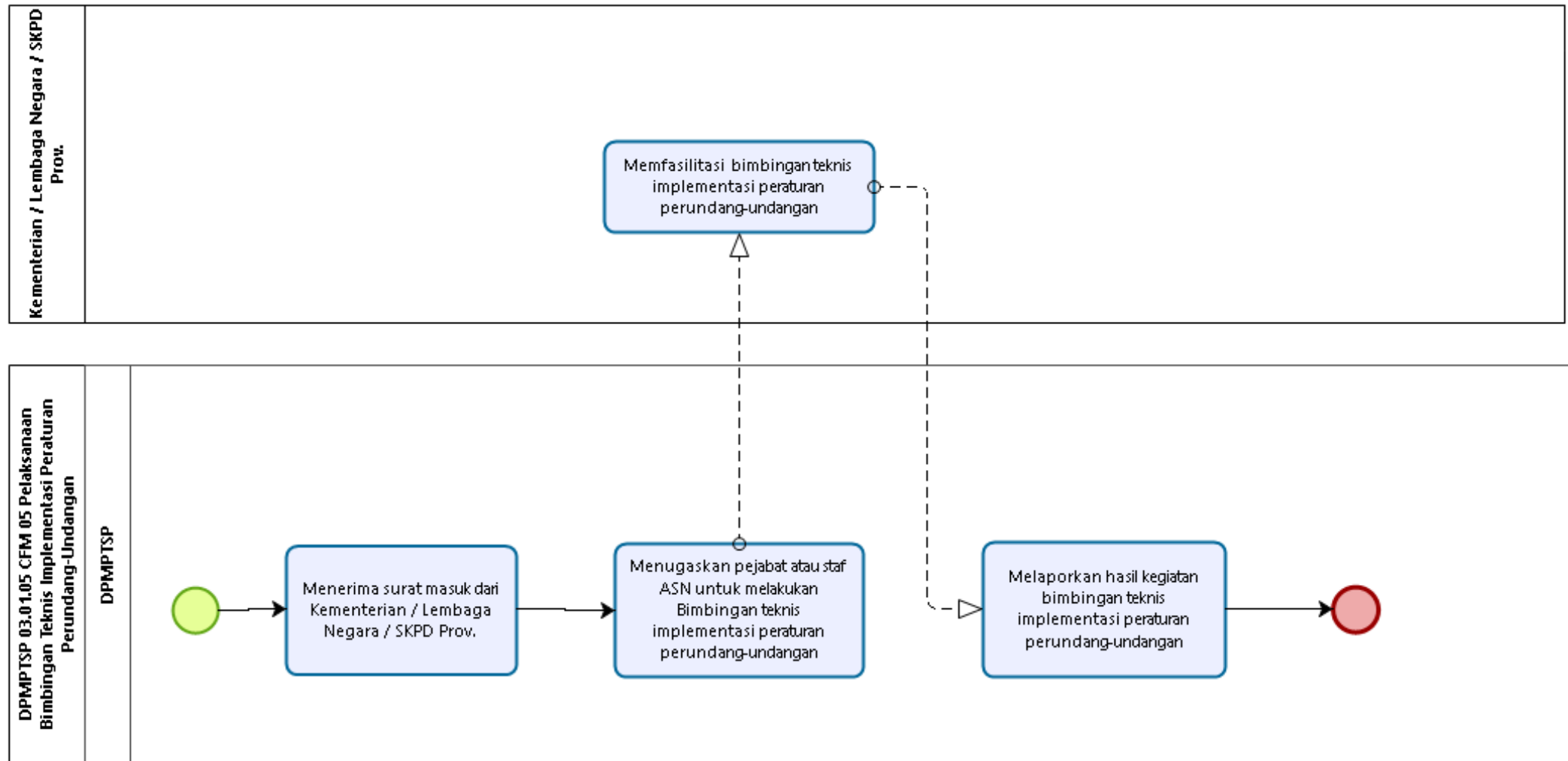


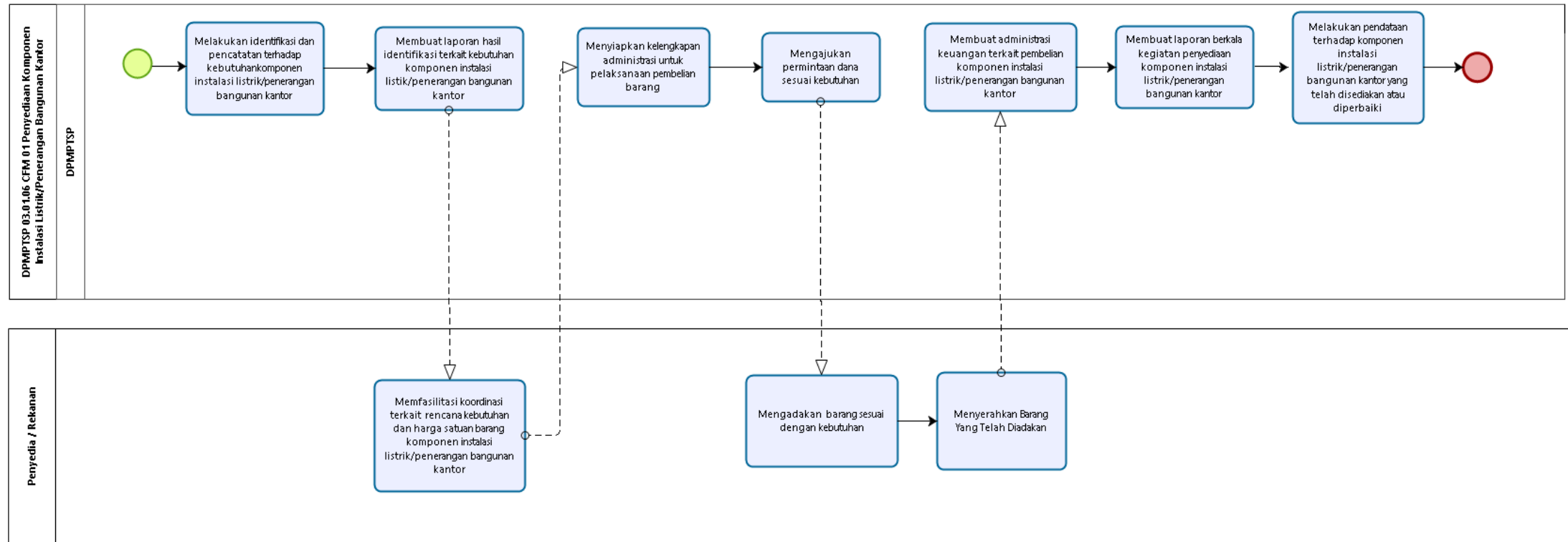


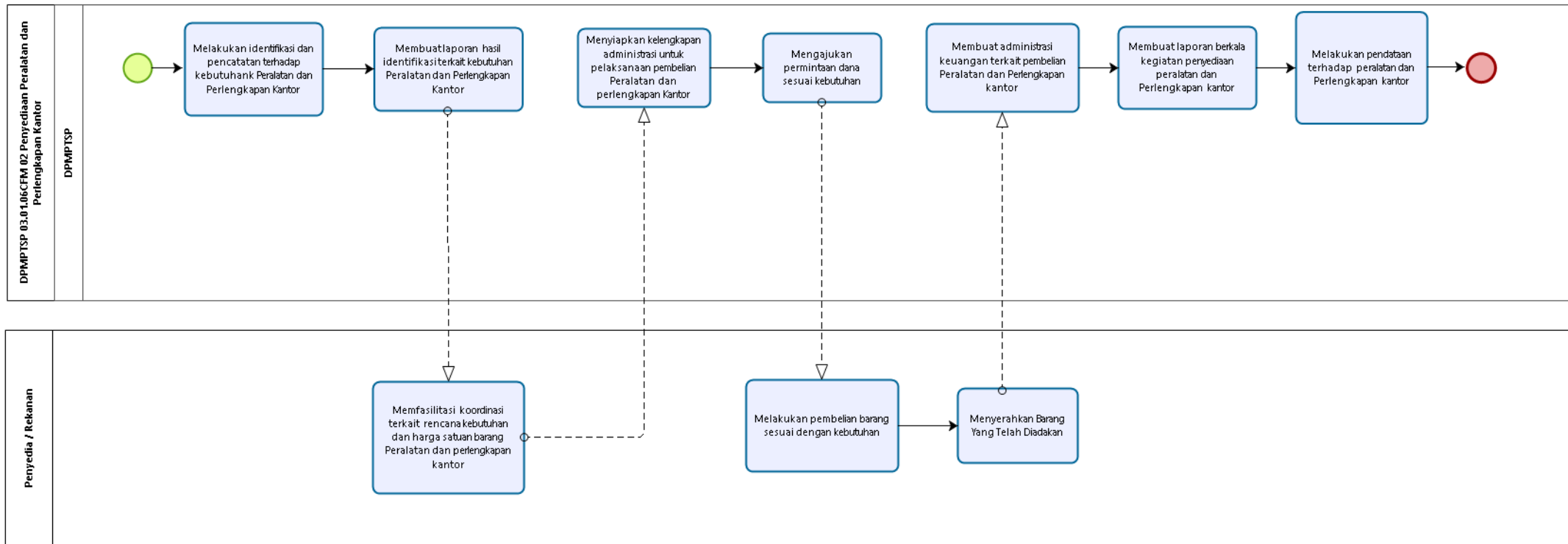


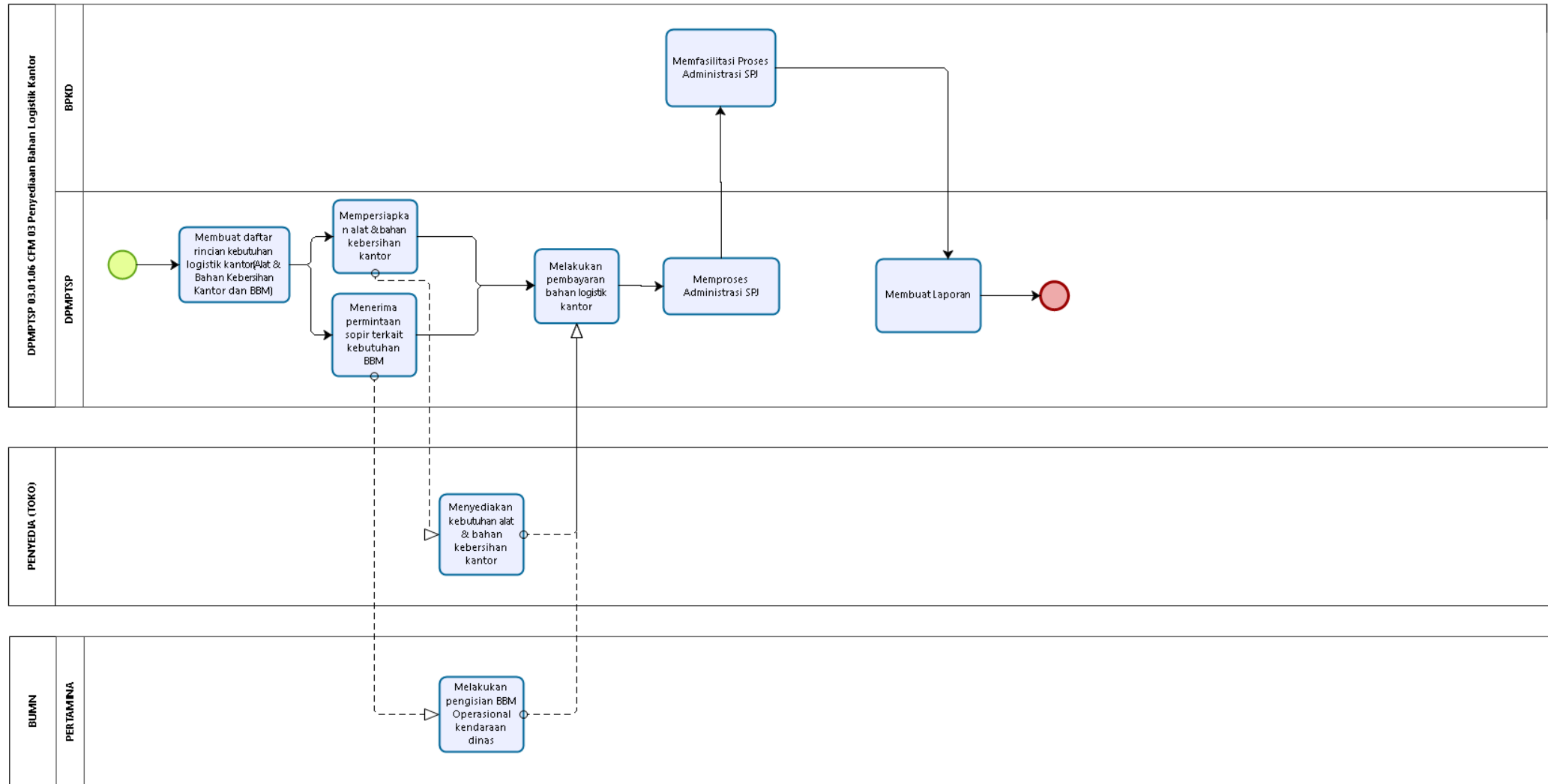


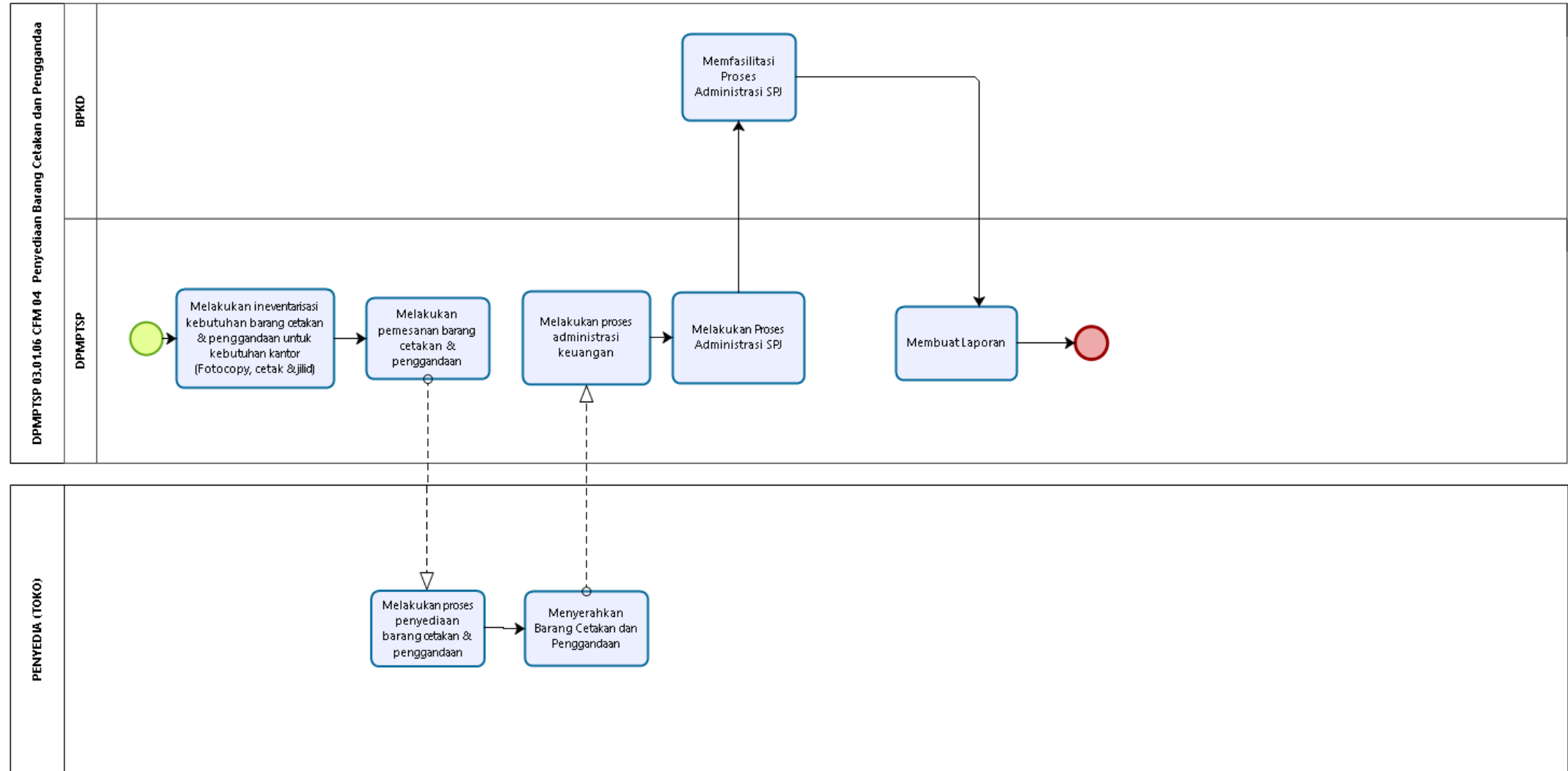


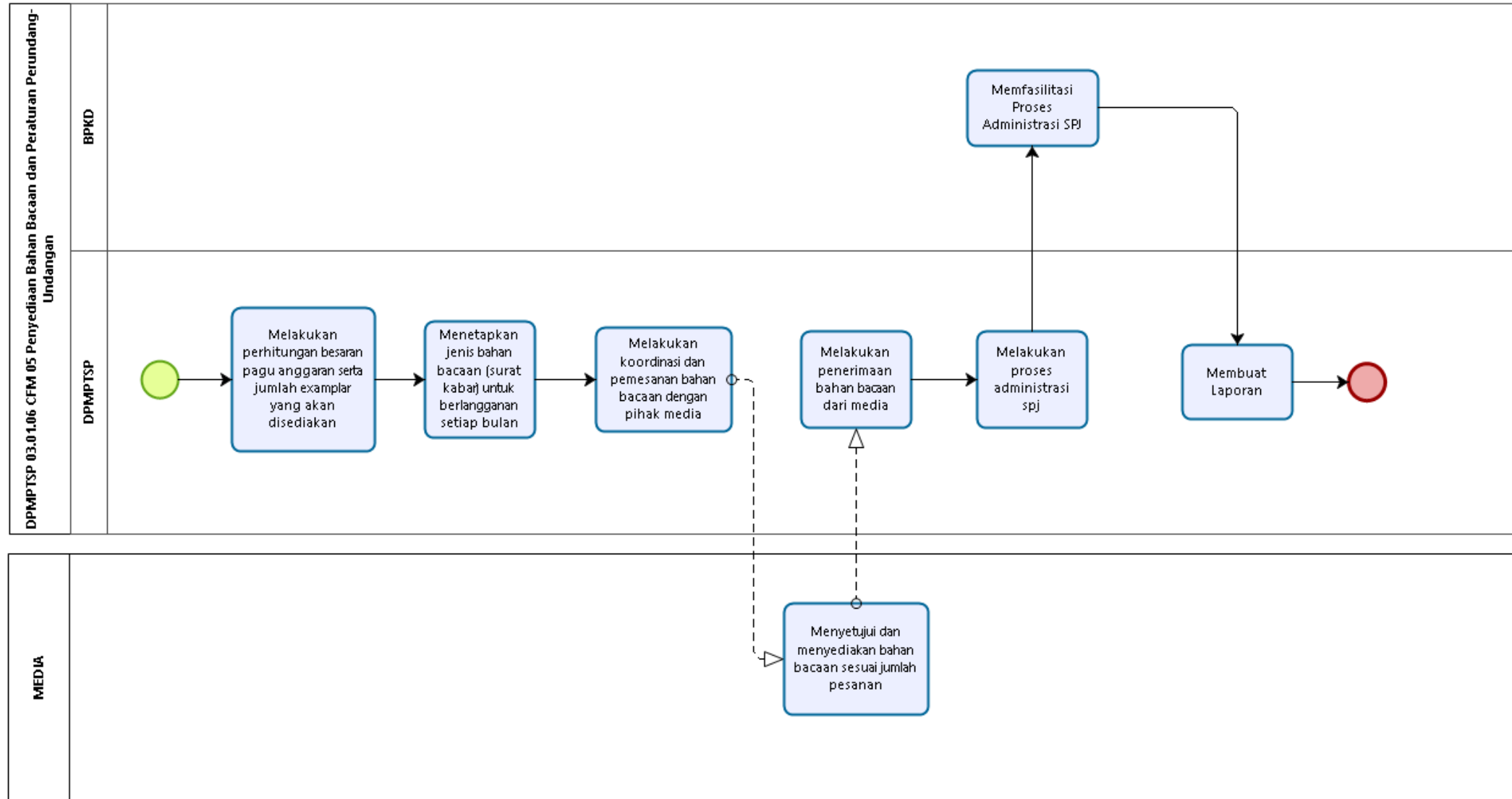


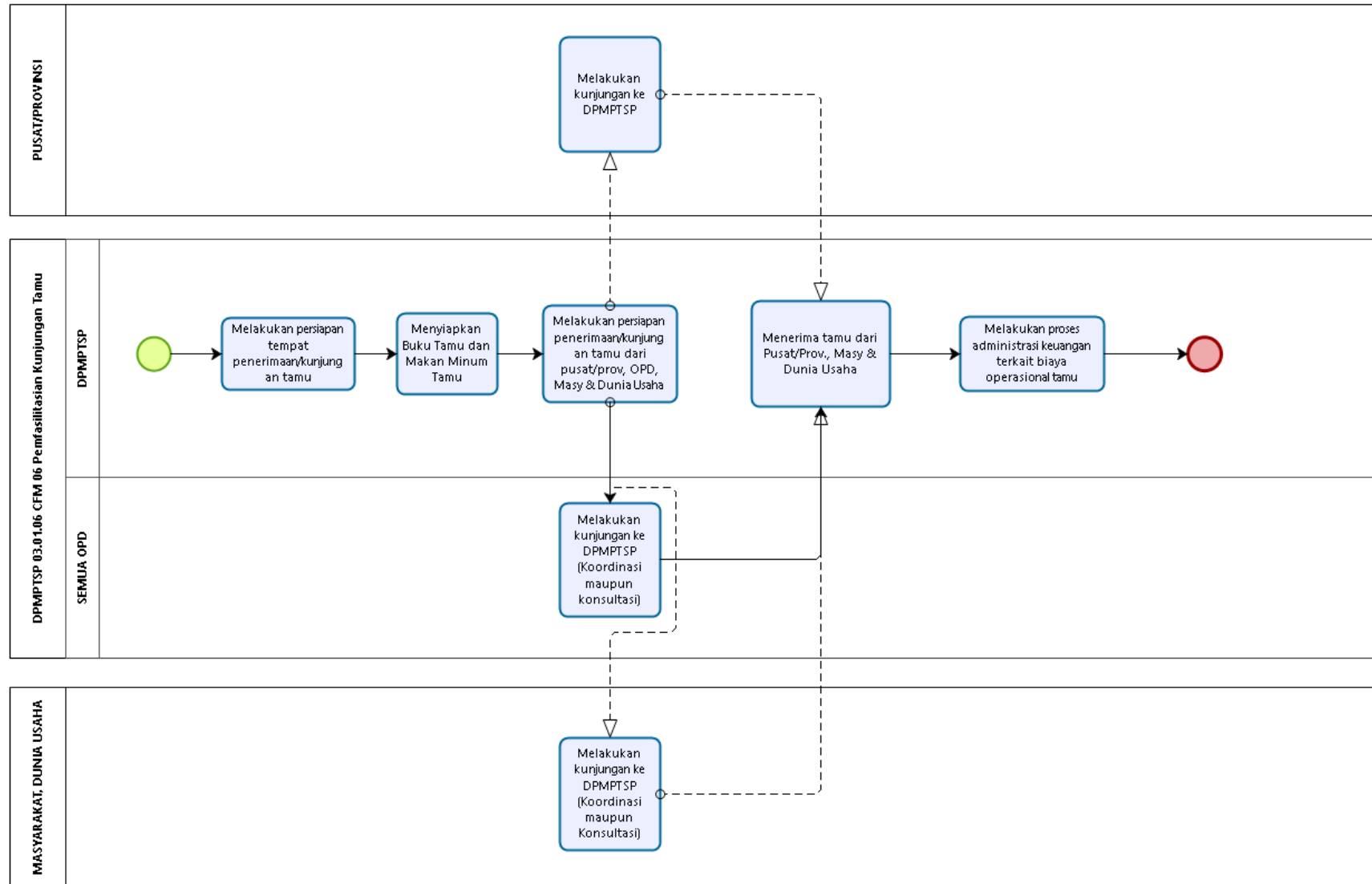


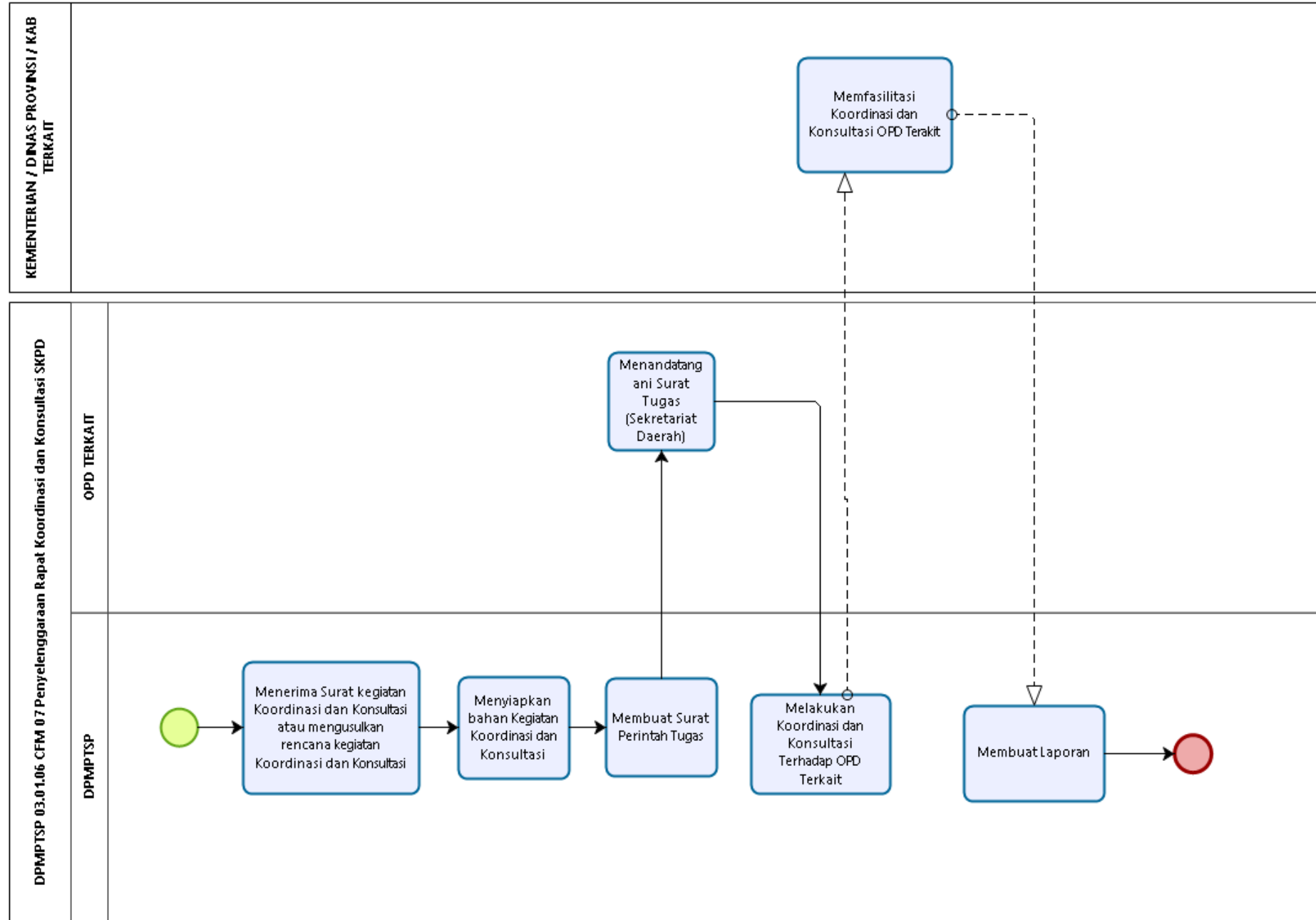


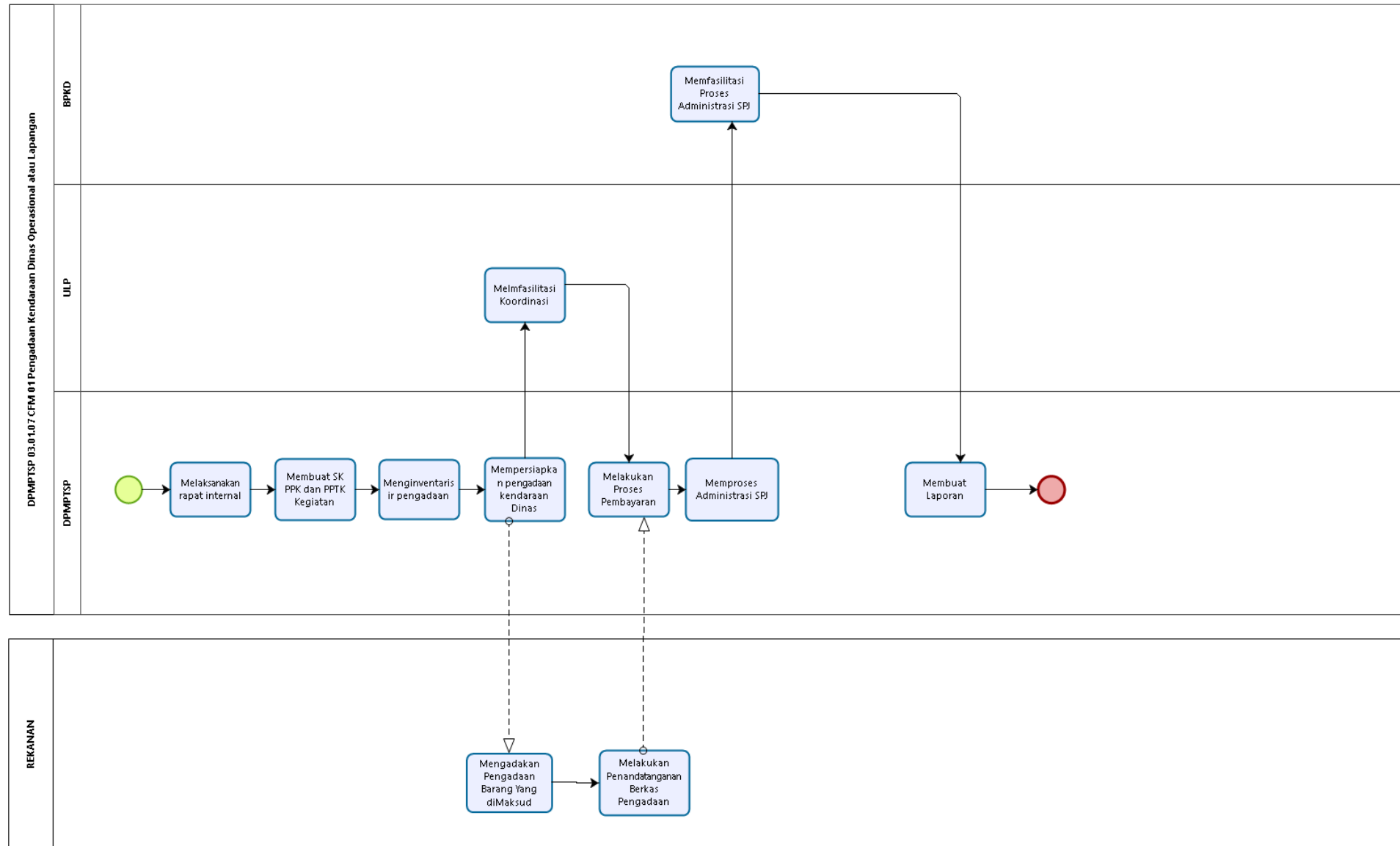


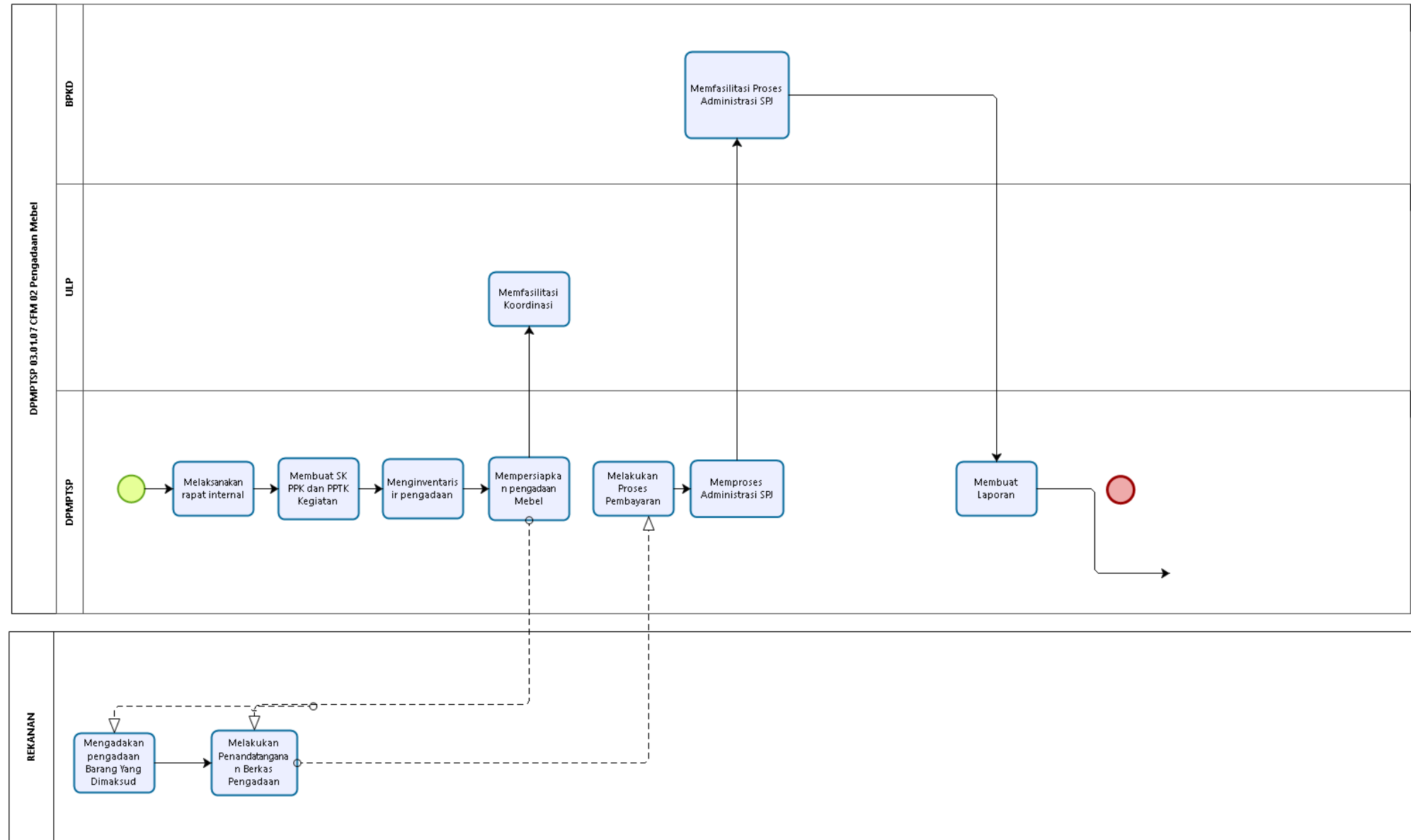


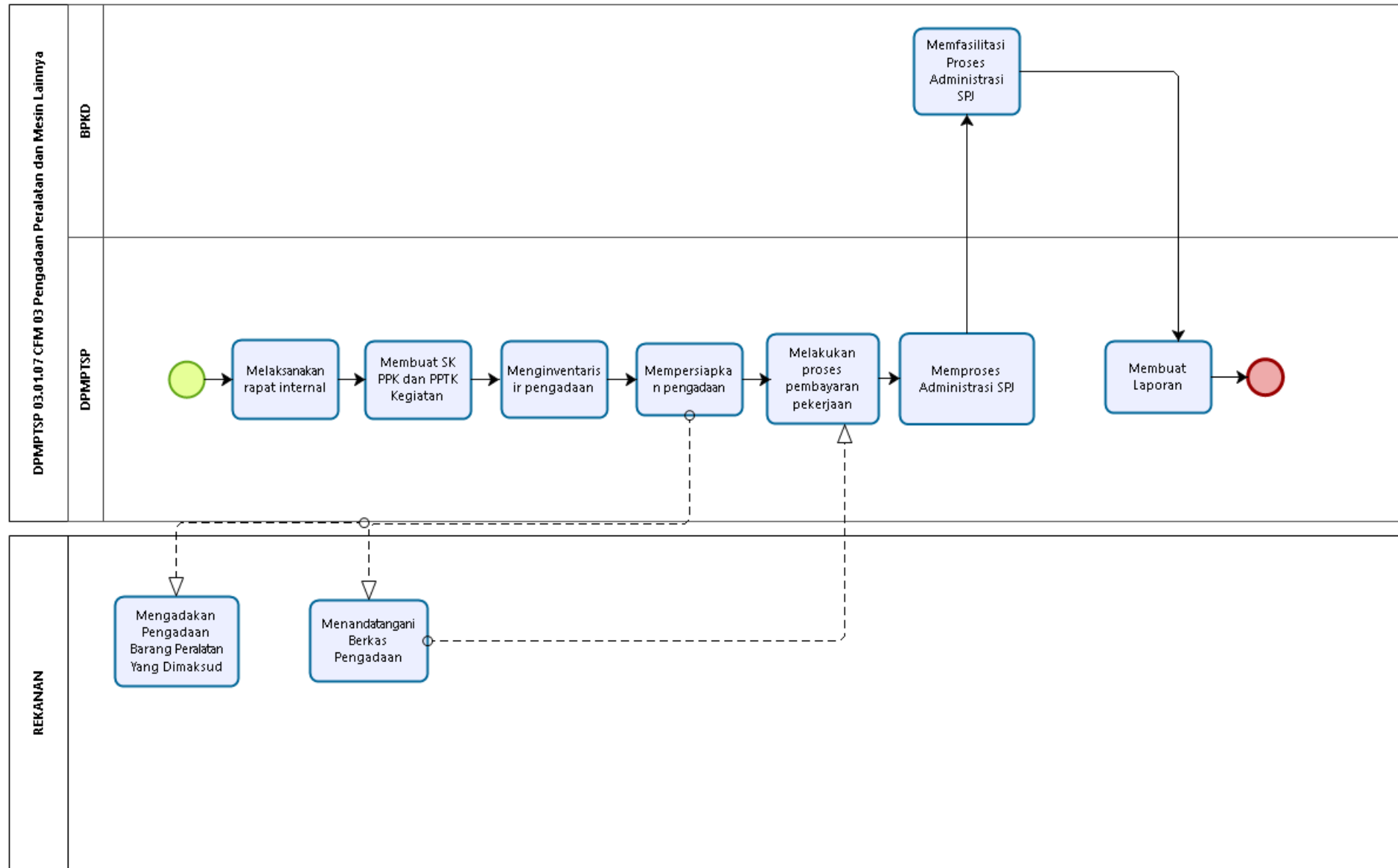


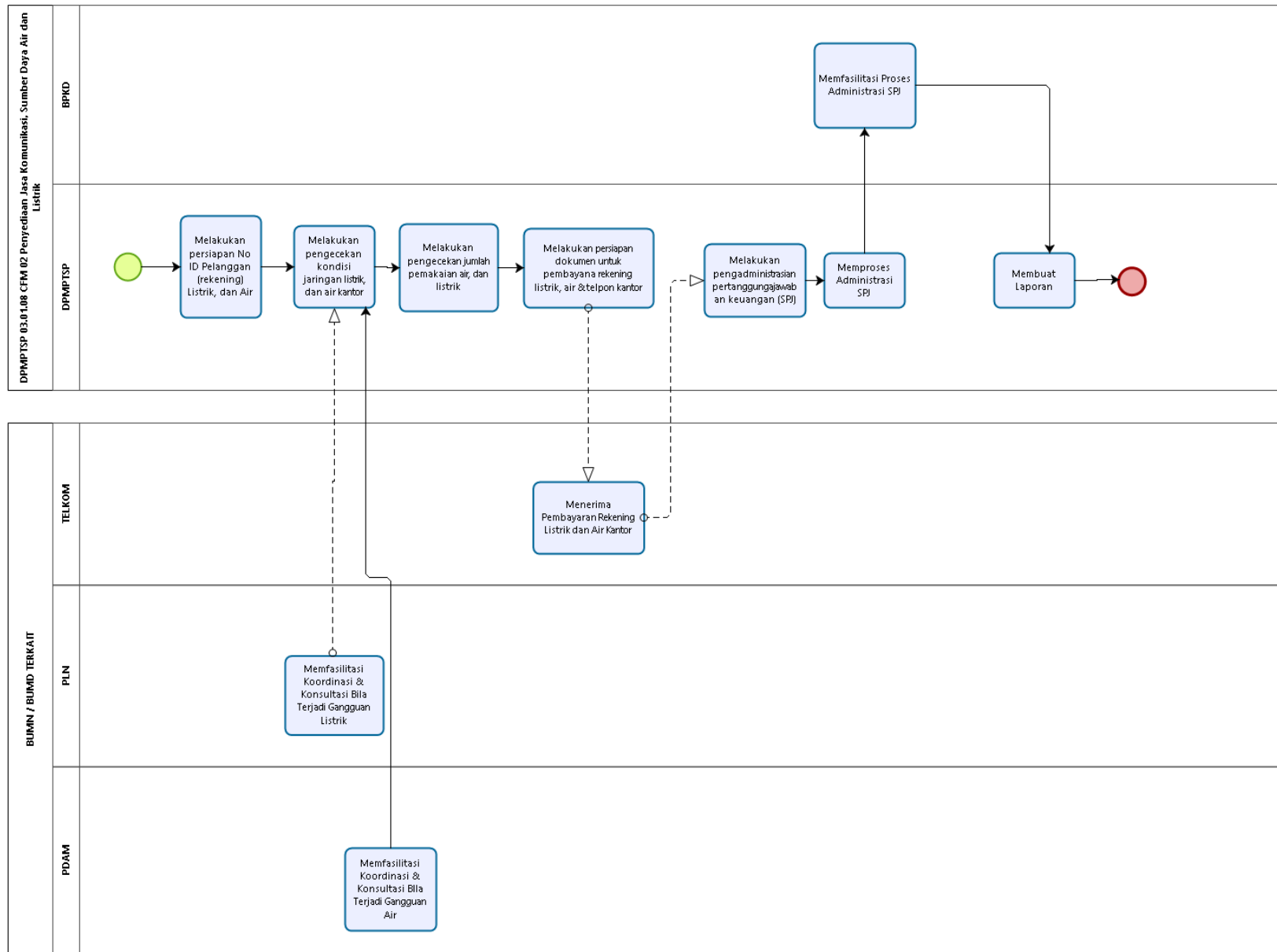


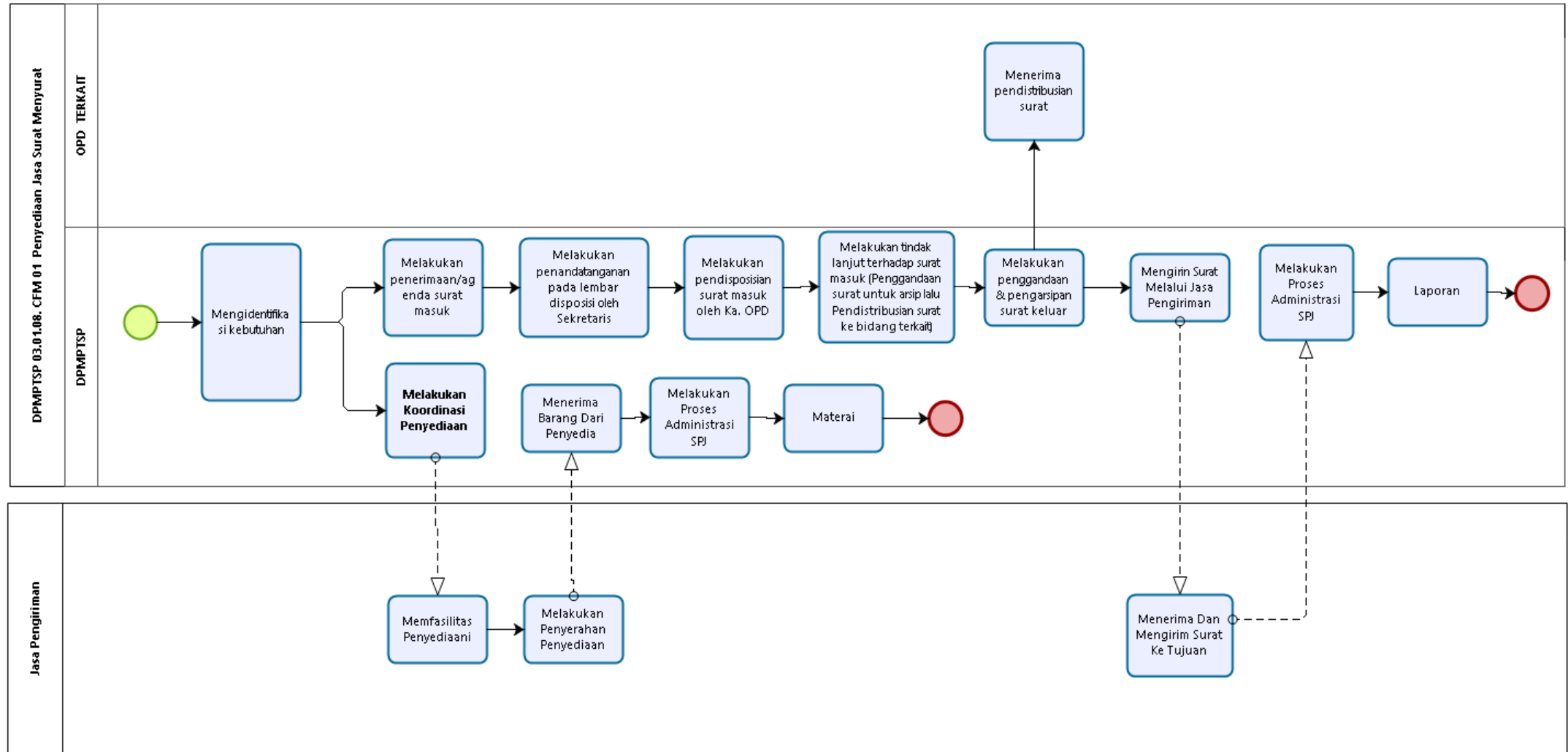


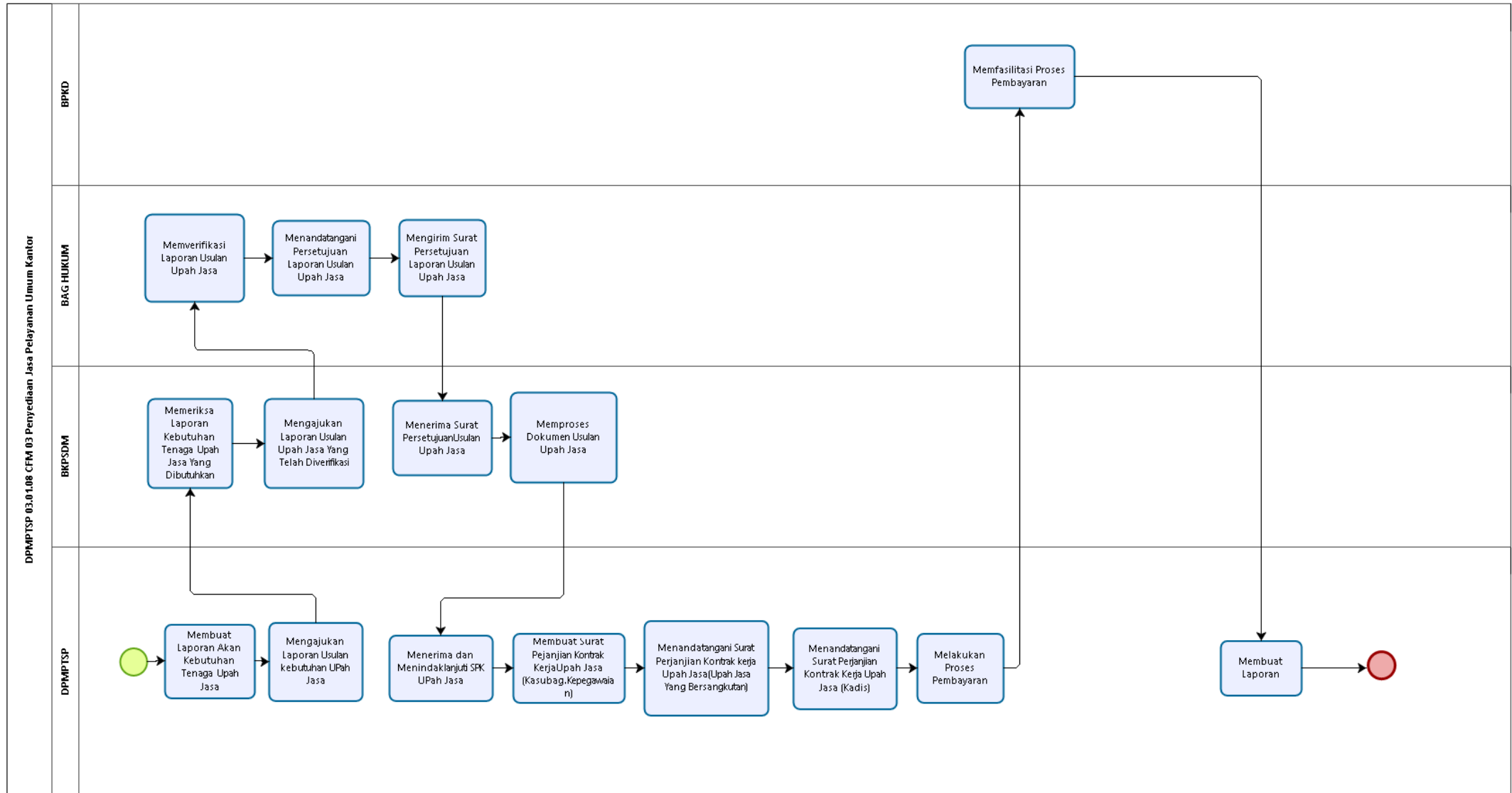


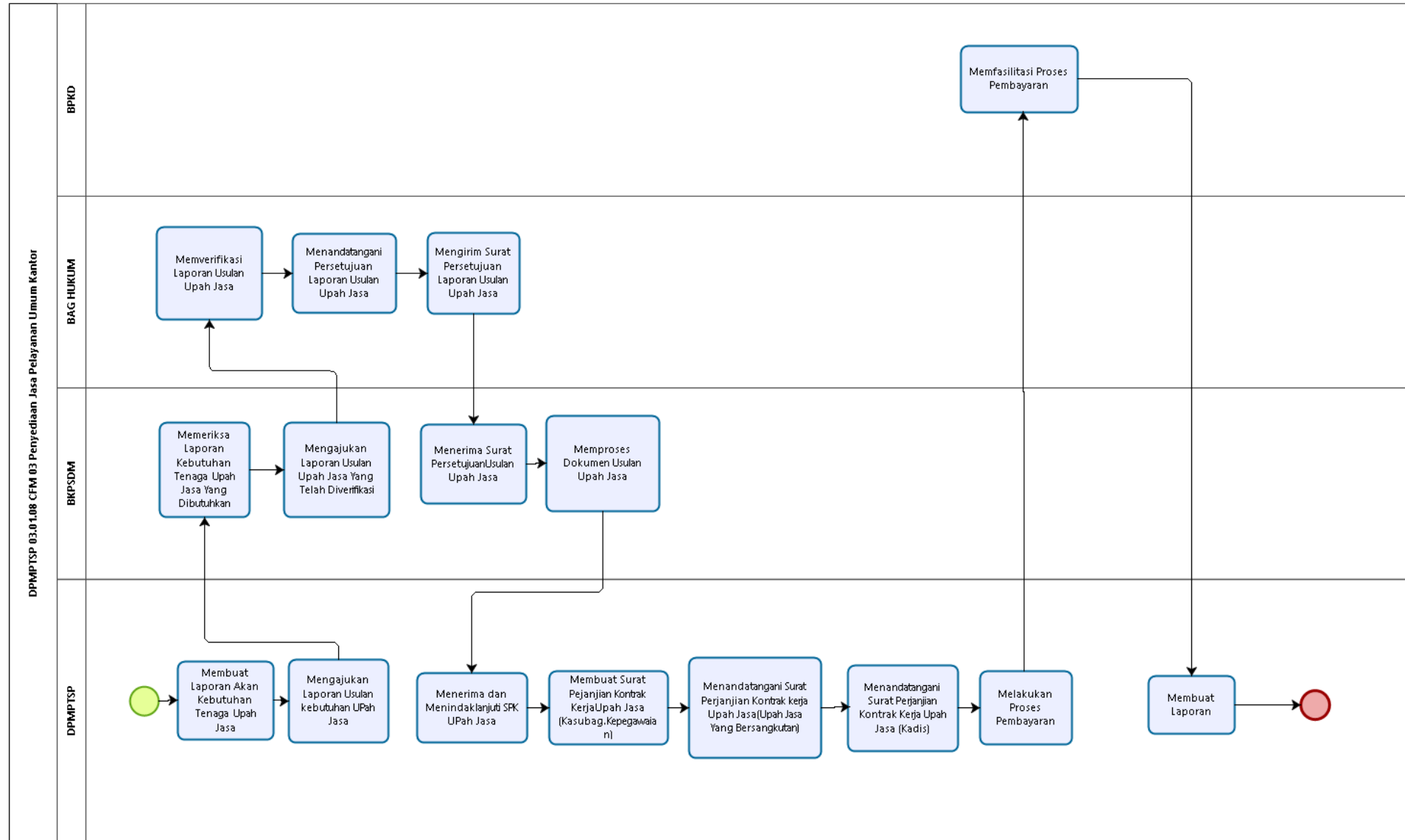


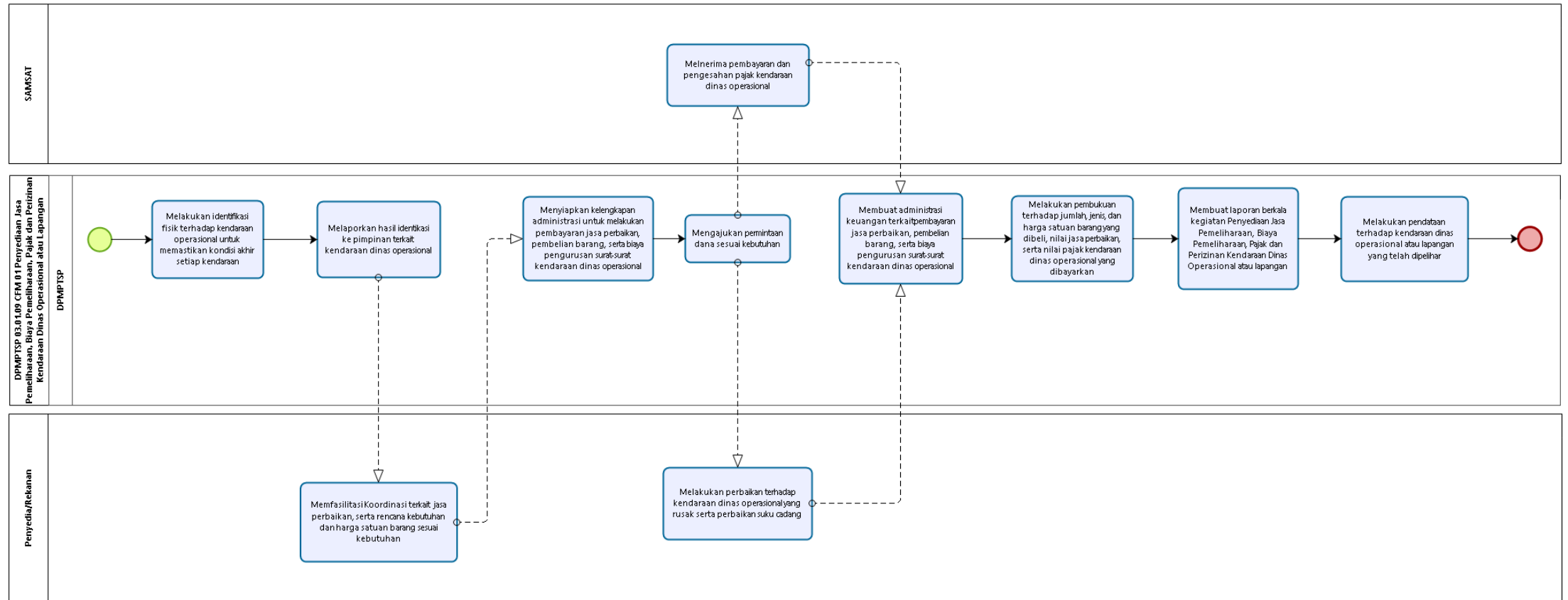


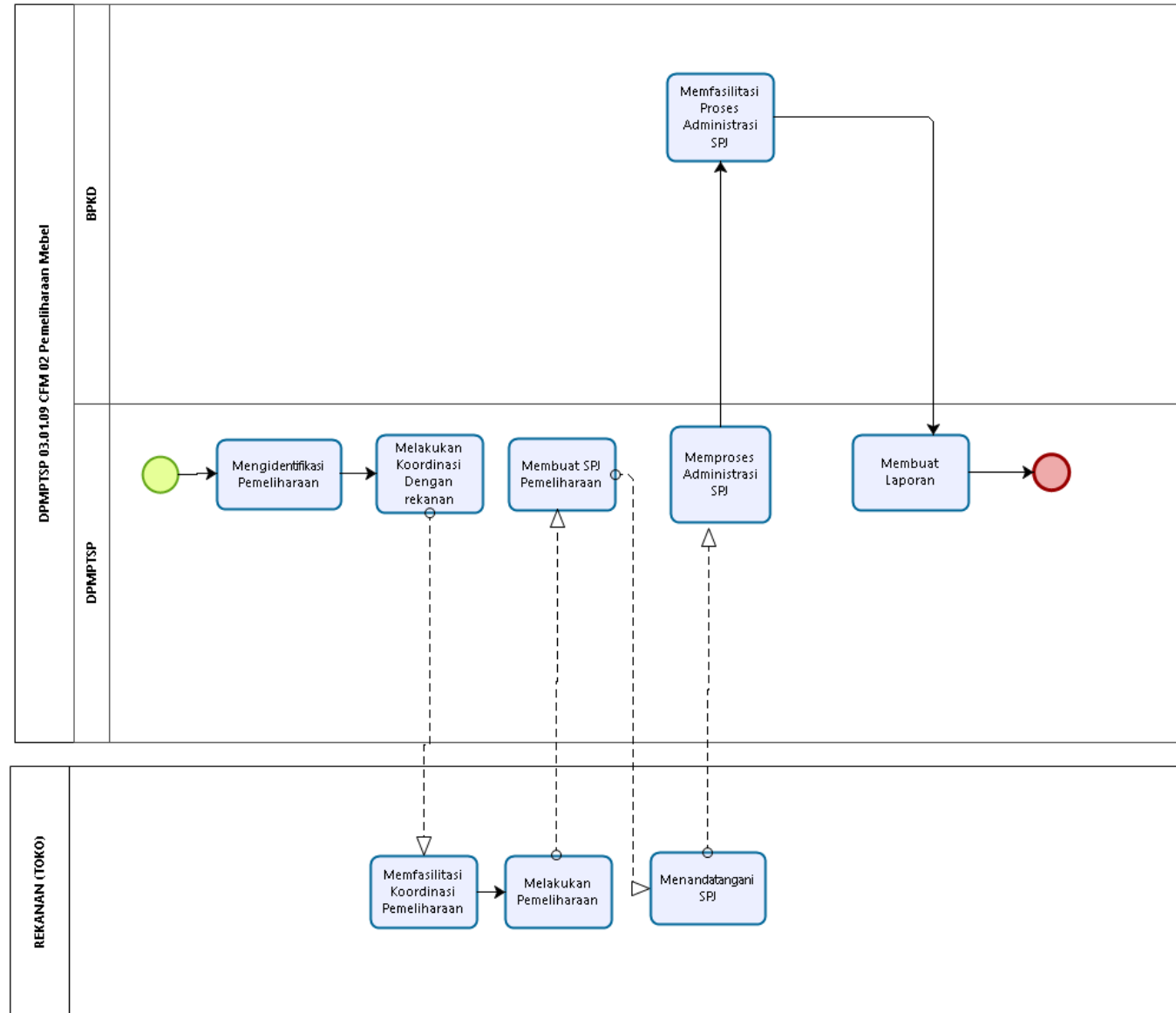


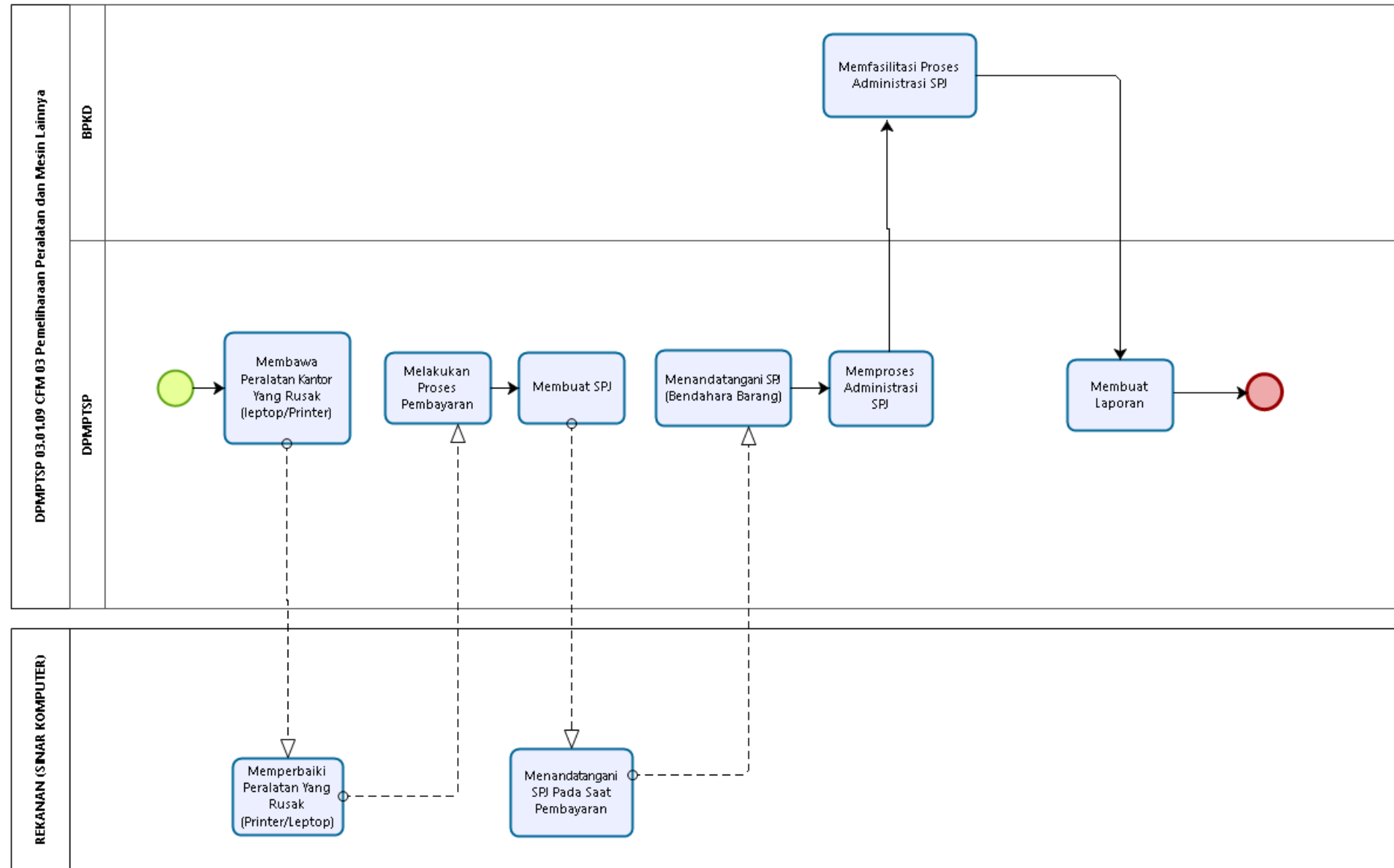


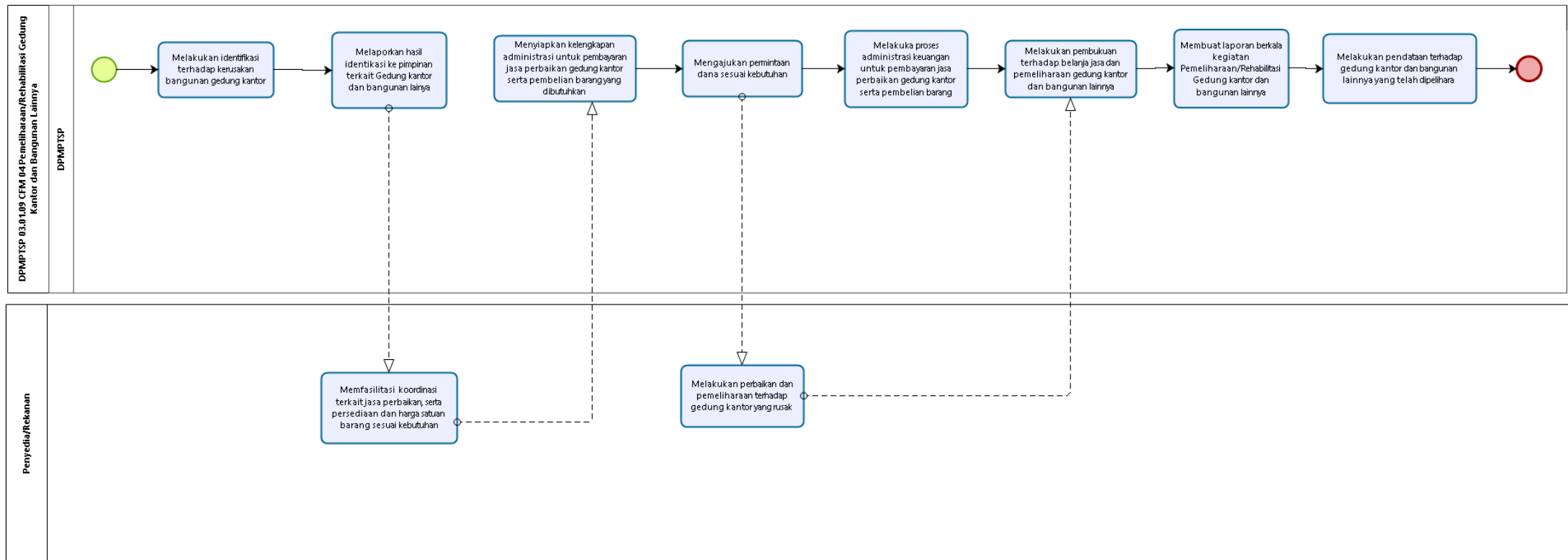












KEPALA DINAS PENANANAMN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR,

ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 196412311987031208